



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 TENTANG
AKUNTANSI KOPERASI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PADA KPRI
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2008-2009**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Riki Aribowo

7250406528

PERPUSTAKAAN
UNNES

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07 September 2010

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Kusmuriyanto, M.Si
NIP. 196005241984031001

Indah Fajarini Sri W, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19780413200112202

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

PERPUSTAKAAN
UNNES

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP. 197212151998021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 September 2010



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 07 September 2010

Riki Aribowo
NIM. 7250406528



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak merobahi keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobahi keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(Q.S Ar Ra’d: 11)

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S Al- Insyiroh: 6-8)

“Sampaikanlah olehmu ilmu yang kamu dapat dariKu walau hanya satu ayat”.

(HR. Buchari dan Muslim)

PERSEMBAHAN:

Untuk Bapak dan Ibuku Budi Suwarno dan Tusriyati yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang kepadaku

Almamaterku,

Chusnur Robitoh yang selalu menemaniku

Keluarga dan saudaraku,

Dan Teman-temanku,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha Pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis baik berupa dorongan moril maupun materiil sehingga sangat membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Amir Mahmud, S.Pd, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Kusmuriyanto, M.Si, sebagai pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritik yang bersifat membangun.
5. Indah Fajarini Sri W, S.E, M.Si, Akt selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritik yang bersifat membangun.
6. Seluruh Ketua KPRI di Kabupaten Purbalingga yang telah membantu memperoleh data dan penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah berkenan membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 07 September 2010

Penulis

SARI

Aribowo, Riki. 2010. *Analisis Penerapan PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009.* Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. II. Indah Fajarini Sri W, SE, M,Si, Akt.

Kata Kunci : Akuntansi Koperasi, Perkembangan Usaha dan KPRI di Kabupaten Purbalingga.

Pertanggungjawaban laporan keuangan koperasi yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27, diharapkan mampu mendorong koperasi untuk berusaha secara efisien dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggotanya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK No. 27 dan perkembangan usaha pada KPRI, adakah pengaruh penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan PSAK No. 27 dan perkembangan usaha pada KPRI, mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009.

Populasi dalam penelitian adalah 54 KPRI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 KPRI dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi termasuk kategori baik dengan presentase rata-rata 66,08%. . Perkembangan usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 termasuk dalam kategori rendah dengan presentase rata-rata 109,43%. Penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi berpengaruh terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi semakin tinggi pula perkembangan usaha pada Koperasi. Masukan yang penting bagi pihak manajer koperasi bahwa penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi dapat meningkatkan partisipasi anggota, yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan usaha koperasi.

ABSTRACT

Aribowo, Riki. 2010. *Analysis of Adoption of SFAS No. 27 on Accounting for Cooperatives and Its Effect on Business Development at KPRI in Purbalingga Year 2008-2009.* Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. Co Advisor. Indah Fajarini Sri W, S.E, M.Si, Akt.

Keywords: Cooperative Accounting, Business Development and KPRI in Purbalingga.

Responsibility for co-operative financial statements that refer to the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 27, is expected to encourage cooperatives to try to be efficient in meeting the needs of its members, so as to increase the participation of its members. These conditions will affect the development of cooperative business. The problem in this research is how the application of SFAS No. 27 and business development at KPRI, is there any effect of SFAS No. 27 about the accounting to the development of cooperative efforts on KPRI in Purbalingga Year 2008-2009. The purpose of this study was to describe the adoption of SFAS No. 27 and business development at KPRI, determine whether there is influence adoption of SFAS No. 27 about the accounting to the development of cooperative efforts on KPRI in Purbalingga Year 2008-2009.

The population of the study was 54 KPRI. The sample in this study amounted to 24 KPRI using purposive sampling technique. Data collection using questionnaires. This study uses simple regression analysis.

The results showed that the adoption of SFAS No. 27 regarding accounting cooperative good category with an average percentage of 66.08%. KPRI business development in Purbalingga year 2008-2009 included in the low category with an average percentage of 109.43%. Implementation of SFAS No. 27 about the accounting effect on the development of cooperative efforts on KPRI in Purbalingga Year 2008-2009.

Based on research results, it can be concluded that the higher the adoption of SFAS No. 27 about the higher accounting cooperative business development in MFI. Inputs are important to the manager that the application of SFAS No. 27 about the accounting to increase the participation of member cooperatives, which in turn will enhance the development of cooperatives.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
ABSTARCT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Perkembangan Usaha Koperasi.....	11
2.1.1. Pengertian Perkembangan Usaha	11
2.1.2. Pengukuran Tingkat Perkembangan Usaha	12
2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha	14
2.2. Laporan Keuangan Koperasi	15
2.2.1. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi	15
2.2.2. Pengguna Laporan Keuangan Koperasi	17
2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi.....	18
2.3. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi	21

2.3.1. Pengeretian Standar Akuntansi Keuangan.....	21
2.3.2. Unsur-unsur dalam Standar Akuntansi Keuangan Koperasi.....	21
2.3.3. Kelengkapan Pengungkapan Wajib.....	30
2.4. Kerangka Berpikir.....	36
2.5. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
3.1.1. Populasi Penelitian.....	42
3.1.2. Sampel Penelitian.....	43
3.2. Variabel Penelitian.....	43
3.2.1. Perkembangan Usaha.....	43
3.2.2. Penerapan PSAK No. 27.....	44
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4. Metode Analisis Data.....	45
3.4.1. Analisis Deskriptif.....	45
3.4.1.1. Tingkat Perkembangan Usaha.....	45
3.4.1.2. Tingkat Penerapan PSAK No. 27.....	46
3.4.2. Analisis Regresi.....	47
3.4.3. Uji Koefisien Determinasi.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.1.1. Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Purbalingga.....	51
4.1.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	51
4.1.2.1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 Pada KPRI di Kabupaten Purbalingga.....	51
4.1.2.2. Perkembangan Usaha.....	60
4.1.3. Analisis Regresi.....	65
4.1.4. Uji Koefisien Determinasi.....	68
4.2. Pembahasan.....	69

4.2.1. Pengaruh Penerapan PSAK No. 27 Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi	69
BAB V PENUTUP	73
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar KPRI di Kabupaten Purbaingga.....	42
3.2 Kriteria Penerapan PSAK No. 27	47
4.1 Gambaran Umum Penerapan PSAK No. 27 pada KPRI di Kabupaten Purbalingga.....	51
4.2 Gambaran Umum Penerapan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan pada KPRI di Kabupaten Purbalingga.....	52
4.3 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan.....	53
4.4 Gambaran Umum Penerapan Konsep Aset pada KPRI di Kabupaten Purbalingga.....	54
4.5 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Aset	55
4.6 Gambaran Umum Penerapan Konsep Kewajiban pada KPRI di Kabupaten Purbalingga	56
4.7 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Kewajiban.....	56
4.8 Gambaran umum Penerapan Konsep Ekuitas pada KPRI di Kabupaten Purbalingga	57
4.9 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Ekuitas.....	58
4.10 Gambaran Umum Penerapan Konsep Pendapatan dan Beban pada KPRI di Kabupaten Purbalingga	59
4.11 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Pendapatan dan Beban.....	60
4.12 Hasil output uji Kolmogorov-Smirnov	66
4.13 Hasil output SPSS regresi linier sederhana	68
4.17 Koefisien Determinasi.....	69

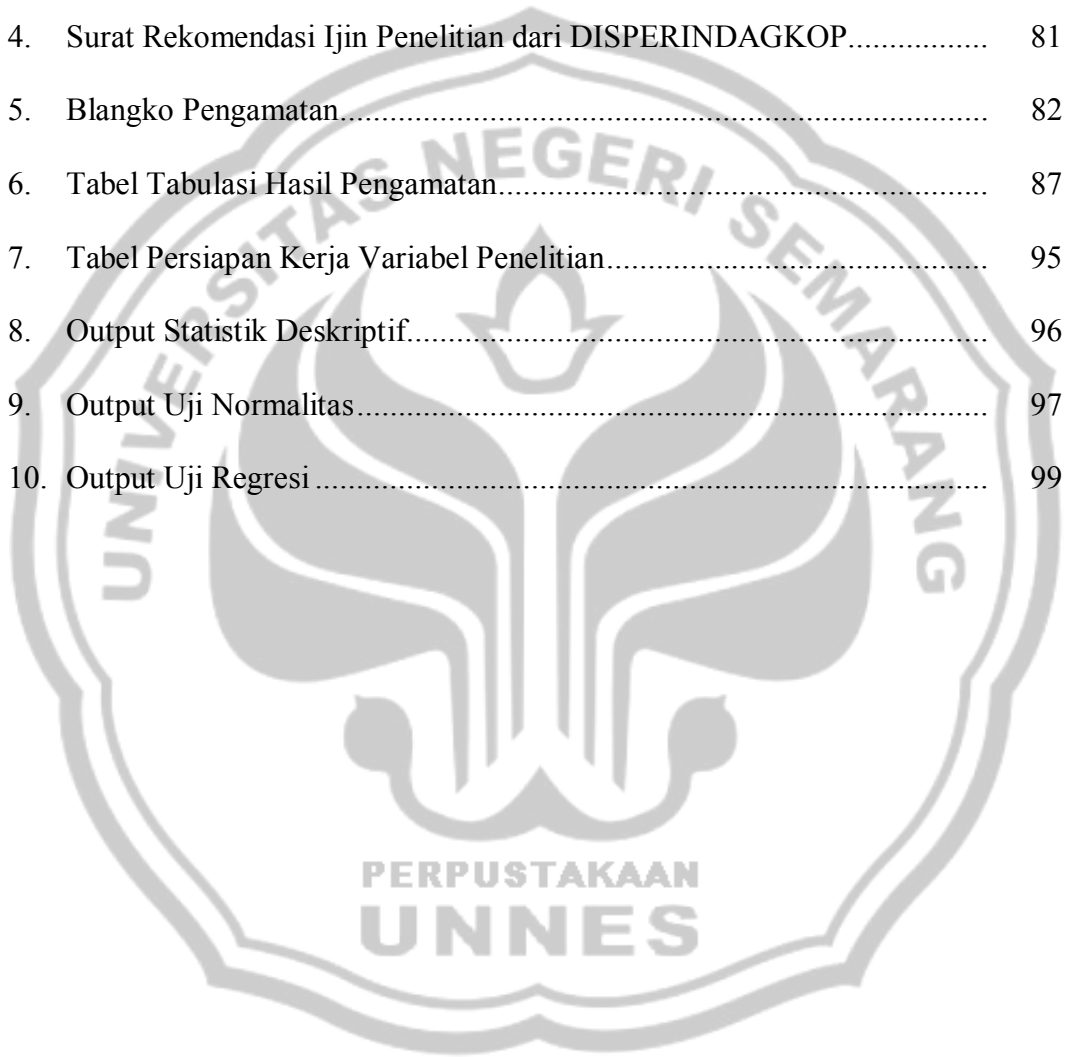
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	41
4.1. Grafik Perkembangan Usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga	61
4.2. Grafik Perkembangan Volume Usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga..	62
4.3. Grafik Perkembangan <i>net asset</i> KPRI di Kabupaten Purbalingga	63
4.4. Grafik Perkembangan SHU KPRI di Kabupaten Purbalingga	64
4.5. Histogram.....	66
4.6. Normal P-P Plot of Regression Standardized.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Ijin Penelitian.....	78
2. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari KESBANGPOLLINMAS	79
3. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari BAPPEDA	80
4. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari DISPERINDAGKOP.....	81
5. Blangko Pengamatan.....	82
6. Tabel Tabulasi Hasil Pengamatan.....	87
7. Tabel Persiapan Kerja Variabel Penelitian.....	95
8. Output Statistik Deskriptif.....	96
9. Output Uji Normalitas.....	97
10. Output Uji Regresi	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945, terdapat tiga pelaku ekonomi yaitu sektor negara, sektor swasta, dan koperasi. Ketiga sektor pelaku ekonomi tersebut harus saling mendukung, supaya dapat tercapainya kedudukan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang adil dan makmur. Lebih lanjut dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 tersebut adanya dasar *demokrasi ekonomi*, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan dari koperasi seperti tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional, merupakan salah satu alat untuk memberdayakan potensi rakyat dengan basis kebersamaan. Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya (Tulus, 2008:3).

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota

27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

Mengingat pentingnya tujuan koperasi yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan harapan untuk tercapainya tujuan tersebut, maka sangat diperlukan peningkatan perkembangan koperasi, baik dari sisi perkembangan organisasi, perkembangan usaha, dan perkembangan lain yang harus terus diupayakan. Perkembangan usaha yang harus terus ditingkatkan dalam kaitannya dengan ekonomi rakyat, koperasi seharusnya mempunyai kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah maklum bahwa perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini bila dilihat dari segi kuantitas memang sangat menggembirakan, tetapi dari segi kualitas masih sangat memprihatinkan (Pandji dan Widiyanti : 142).

Kualitas perkembangan koperasi selalu menjadi bahan perdebatan, karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Secara mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya (Tulus, 2008:3). Keberadaan koperasi dari segi kualitas, masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha, lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan

koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.

Perkembangan usaha koperasi sekarang ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Aspek kelembagaan dan aspek usaha merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi. Aspek kelembagaan tersebut meliputi: kepercayaan dan partisipasi anggotanya yang belum optimal, alat kelengkapan organisasi (Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa) belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, juga masalah pengawasan yang belum memadai. Aspek usaha juga menjadi permasalahan tersendiri bagi koperasi, yaitu belum mampu untuk memanfaatkan peluang usaha dengan baik yang disebabkan kualitas pengelola yang masih belum memadai dan sarana usaha yang juga kurang memadai serta lemahnya permodalan (Pandji :149).

Victor (2008:8) menjelaskan ada dua permasalahan yang menyebabkan perkembangan usaha koperasi masih jauh dari yang diharapkan yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal koperasi tersebut meliputi: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat lemah terutama di bidang keorganisasian, keuangan, administrasi, pembukuan. Struktur permodalan koperasi yang masih mengandalkan modal luar, hal ini disebabkan karena lebih banyak anggota yang meminjam dari pada menyimpan. Infrastruktur teknologi yang masih terbatas, terutama dalam memanfaatkan sistem komputer. Kurangnya pemahaman dan pelaksanaan pengelolaan usaha dengan prinsip kehati-hatian serta menjaga tingkat kesehatan koperasi sebagai kepercayaan anggota, serta kurangnya pemahaman jati diri koperasi dalam

pelaksanaan praktek koperasi yang benar seperti manajemen pengelolaan USP-koperasi yang belum otonom dan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tidak tepat waktu. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah permasalahan eksternal koperasi, yaitu: pengawasan dan pembinaan yang belum optimal karena terbatasnya pemahaman Undang-Undang Koperasi dari Dinas Koperasi akibat intensitas mutasi yang tinggi sekali. Tingkat kepercayaan anggota yang relatif masih rendah, serta citra koperasi yang masih kurang baik yang merupakan hambatan dalam melakukan persaingan usaha dengan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang melakukan hal-hal berikut ini: (1) memakai komite-komite, penasehat-penasehat dan ahli-ahli dari luar secara efektif; (2) selalu memberikan informasi yang lengkap dan *up to date* kepada anggota-anggotanya sehingga mereka tetap terlibat dan suportif; (3) melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan bisnis dengan memakai agenda yang teratur, prosedur-prosedur parlemen, dan pengambil keputusan yang demokrasi; (4) mempertahankan relasi-relasi yang baik antara manajemen dan dewan direktur/pengurus dengan tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas; (5) mengikuti praktek-praktek akuntansi yang baik, dan mempersentasikan laporan-laporan keuangan secara regular; (6) mengembangkan aliansi-aliansi dengan koperasi-koperasi lainnya; dan (7) mengembangkan kebijakan-kebijakan yang jelas terhadap konfidensial dan konflik kepentingan (Pitman dalam Tulus, 2008:12).

Koperasi harus dikelola secara profesional dan benar supaya permasalahan koperasi tersebut dapat teratasi. Sebuah koperasi yang baik akan melakukan

pengelolaan secara profesional dalam semua bidang, termasuk bidang keuangan. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi, juga membutuhkan jasa akuntansi untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. Laporan keuangan koperasi mencatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil usaha (SHU) yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. Adanya satu standar dalam bidang akuntansi koperasi menjadi sangat penting, supaya semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus untuk koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian.

PSAK No. 27 sebagai suatu standar yang telah ditetapkan, sudah seharusnya diterapkan dalam laporan keuangan koperasi di Indonesia. Berdasarkan PSAK No. 27, bentuk laporan keuangan yang seharusnya disajikan yaitu berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dalam pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum menerapkannya, atau sudah menerapkan, tetapi belum sesuai dengan PSAK No. 27. Penelitian terhadap penerapan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian pada koperasi menjadi sangat penting, karena akan menjadi tolak ukur kualitas koperasi serta sebagai salah satu tolak ukur profesionalisme pengelolaan koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu koperasi yang memberikan manfaat yang cukup besar bagi para anggotanya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang didirikan dan dianggotai oleh para pegawai negeri yang mempunyai penghasilan yang tetap, diharapkan mampu untuk menumbuhkembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki total 56 KPRI, dan 54 KPRI yang aktif. Sebagai suatu wilayah yang mempunyai jumlah KPRI yang cukup banyak, maka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian menjadi sangat penting.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa KPRI di Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian. Permasalahan ini dapat dilihat dari hasil penelitian awal yang dilakukan pada 5 (lima) laporan keuangan KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008 dan 2009, yaitu KPRI Mas, KPRI Mekar sari, KPRI Bhakti praja, KPRI Pancamarga, dan KPRI Sejati. Tiga dari lima KPRI tersebut yaitu KPRI Bhakti Praja, KPRI Pancamarga, KPRI Sejati tidak ada yang mengungkapkan laporan arus kas, dan laporan promosi ekonomi anggota.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha ketiga KPRI tersebut tidak melaporkan secara terpisah antara pendapatan dari anggota dan non-anggota.

Rakhmawati (2007), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi sudah cukup baik, namun masih terdapat perbedaan dalam penerapannya. Adanya ketidaksesuaian dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi akan mempengaruhi informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan koperasi tersebut. Hal ini akan mempengaruhi penilaian para pemakai informasi laporan keuangan, baik pihak *internal* maupun *eksternal*. Para pemakai informasi laporan keuangan berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana kinerja koperasi, kondisi keuangan, pertumbuhan usaha dan prospek koperasi ke depan. Koperasi sebagai suatu badan usaha meskipun tidak berorientasi mencari keuntungan semata akan tetapi usaha-usaha yang dikelola harus tetap memperoleh penghasilan yang layak dalam menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha. Dibutuhkan informasi yang relevan, tepat, dan akurat supaya pemakai informasi laporan keuangan mengambil keputusan yang tepat pula.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi jika belum memadai, maka akan menyebabkan pemakai informasi laporan keuangan kurang percaya terhadap kinerja koperasi, partisipasi anggota serta masyarakat akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang dapat dilihat dari tingkat perkembangan volume usaha, perkembangan aset, dan perkembangan SHU. Mengingat

pentingnya penerapan PSAK No. 27 pada KPRI dalam meningkatkan perkembangan usaha koperasi, maka peneliti memandang perlu untuk menganalisisnya dengan mengambil judul : **“Analisis Penerapan PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 27 pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009?
2. Bagaimana perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009?
3. Adakah pengaruh penerapan PSAK No. 27 terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan PSAK No. 27 pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009.
2. Mendeskripsikan perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun Tahun 2008-2009.
3. Menganalisis pengaruh penerapan PSAK No. 27 terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori dan praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan PSAK No. 27 terhadap perkembangan usaha pada KPRI di Kabupaten Purbalingga

2. Manfaat secara Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu

- a. Pengurus koperasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.
- b. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perkembangan ekonomi koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Usaha Koperasi

2.1.1. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan dalam arti harfiah adalah bertambah besar/bertambah sempurna. Sedangkan usaha adalah kegiatan atau aktivitas agar diperoleh hasil lebih baik (Winardi 1992 dalam Rakhmawati :34), jadi perkembangan usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar mendapat perubahan yang lebih baik atau bertambah maju, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Departemen Koperasi, Perusahaan Kecil dan Menengah, perkembangan koperasi merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan dilihat dari volume usaha, *net asset* dan laba bersih.

Keberhasilan koperasi dapat diukur dari meningkatnya perkembangan usaha. Perkembangan usaha koperasi dapat diukur dengan cara membandingkan total volume usaha, *net asset*, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Dari ketiga perbandingan tersebut kemudian diambil rata-rata dari ketiga indikator tersebut sehingga diperoleh rasio perkembangan usaha. Kemudian dibandingkan dengan standar perkembangan usaha koperasi yang telah ditetapkan Departemen Koperasi, Perusahaan Kecil dan Menengah.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya perkembangan sesungguhnya dengan standar perkembangan koperasi yang telah ditetapkan oleh Dep. Kop. PK&M yaitu sebesar 110% (DEP. KOP. PPK RI No. 20/PPK/1997).

2.1.2. Pengukuran Tingkat Perkembangan Usaha

Menurut Dep. PK & M (Eli 2007:29) tingkat perkembangan usaha koperasi dapat diukur dari:

1. Perkembangan Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio dan Tamba 2001: 142). Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa dari awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku dalam satu periode. Perkembangan volume usaha dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total volume usaha tahun sekarang}}{\text{Total volume usaha tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

2. Perkembangan *net asset*

Menurut Sitio dan Tamba (2001 :115) kekayaan bersih atau modal sendiri (*Equity*) koperasi terdiri dari :

- a. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini sifatnya permanen, artinya tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

- b. Simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana cadangan yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari dana penyesihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Donasi atau hibah yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

Perkembangan *net asset* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total net asset tahun sekarang}}{\text{Total net asset tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

3. Perkembangan Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha adalah selisih dari seluruh pemasukan dan penerimaan dengan total biaya dalam satu tahun buku (Sitio dan Tamba 2001: 87). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45 pengertian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota

dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Sisa Hasil Usaha merupakan salah satu ukuran keberhasilan koperasi di dalam fungsinya sebagai organisasi yang berwatak sosial. Walaupun ukuran pencapaian Sisa Hasil Usaha tidak begitu besar, karena orientasi utama koperasi bukanlah Sisa Hasil Usaha yang dicapai melainkan pada kesejahteraan para anggotanya.

Sisa Hasil Usaha dalam koperasi dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar. Faktor yang berasal dari dalam koperasi sendiri yaitu:

- a. Partisipasi anggota
- b. Jumlah modal sendiri
- c. Kinerja pengurus
- d. Jumlah unit usaha yang dimiliki koperasi
- e. Kinerja manajer
- f. Kinerja karyawan

Sedangkan faktor-faktor dari luar koperasi yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha adalah (1) Modal pinjaman dari luar, (2) Konsumen dari luar selain anggota, dan (3) Pemerintah.

Perkembangan Sisa Hasil Usaha dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total SHU tahun sekarang}}{\text{Total SHU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang melakukan hal-hal sebagai berikut (Pitman dalam Tulus, 2008:12):

1. Memakai komite-komite, penasehat-penasehat dan ahli-ahli dari luar secara efektif.
2. Selalu memberikan informasi yang lengkap dan *up to date* kepada anggota-anggotanya sehingga mereka tetap terlibat dan suportif.
3. Melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan bisnis dengan memakai agenda yang teratur, prosedur-prosedur parlemen, dan pengambil keputusan yang demokrasi.
4. Mempertahankan relasi-relasi yang baik antara manajemen dan dewan direktur/pengurus dengan tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas.
5. Mengikuti praktek-praktek akuntansi yang baik, dan mempersentasikan laporan-laporan keuangan secara regular.
6. Mengembangkan aliansi-aliansi dengan koperasi-koperasi lainnya.
7. Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang jelas terhadap konfidensial dan konflik kepentingan.

2.2 Laporan Keuangan Koperasi

2.2.1 Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi

Koperasi sebagai suatu badan usaha pada dasarnya mempunyai laporan keuangan yang tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan

usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Hanya saja, perhitungan hasil usaha pada koperasi harus menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan non- anggota dan laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.

Adanya satu standar dalam bidang akuntansi koperasi menjadi sangat penting, supaya semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus untuk koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian.

Laporan keuangan koperasi memiliki karakteristik tersendiri sebagai berikut (Sitio dan Tamba, 2001:109-111):

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya didalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Laporan keuangan meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
3. Laporan keuangan yang disampaikan dalam RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi (UU No. 25 tahun 1992, pasal 36).
4. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (UU No. 25 tahun 1992, pasal 45).

5. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian Sisa Hasil Usaha yang telah diatur dalam AD/ART koperasi.
6. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi.
7. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan Sisa Hasil Usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha.
8. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota, disamping yang berasal dari non-anggota.
9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan non-anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan non-anggota.
10. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman- pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber- sumber lain.
11. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut dengan Sisa Hasil Usaha.
12. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apapun.

2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan Koperasi

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi koperasi (Sitio dan Tamba (2001:107) adalah sebagai berikut:

1. Pengurus

Pengurus membutuhkan informasi yang dihasilkan akuntansi untuk menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dalam menyusun rencana dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun tersebut.

2. Anggota

Anggota yang mempunyai simpanan di koperasi memperoleh manfaat tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, sebelum menjadi anggota diharapkan terlebih dahulu mengetahui kondisi koperasi yang tercermin dari laporan keuangannya.

3. Kreditur

Kreditur berkepentingan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit pada koperasi. Apakah koperasi yang diberikan kredit akan mampu mengembangkan usaha dan mengembalikan hutang-hutangnya atau tidak.

4. Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah, baik Departemen Koperasi maupun Departemen Keuangan berkepentingan terhadap laporan keuangan koperasi. Departemen Koperasi membutuhkan laporan keuangan koperasi sebagai ukuran untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam usaha membina koperasi, sedangkan Departemen Keuangan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna kepada para pemakainya. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.

Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan menurut Sitio dan Tamba (2001:108), adalah sebagai berikut:

1. Manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan Sisa Hasil Usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
3. Transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang non-anggota.
4. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan Koperasi

Keterbatasan laporan keuangan menurut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) dalam Harahap (2001: 235-236), adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan

keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.
5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
8. Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Koperasi

2.3.1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan koperasi mengacu pada PSAK No. 27 tahun 2007 tentang akuntansi perkoperasian. Ghozali dan Chariri (2007: 209) menjelaskan standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan.

Standar akuntansi diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Penggunaan standar akuntansi yang sama oleh penyusun laporan keuangan, pemakai dan auditor, diharapkan dapat mempermudah memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat dicapai.

2.3.2. Unsur-unsur dalam Standar Akuntansi Keuangan Koperasi:

Standar akuntansi keuangan koperasi memiliki beberapa unsur yaitu (1) Penyusunan Laporan Keuangan, (2) Aset, (3) Kewajiban, (4) Ekuitas, dan (5) Pendapatan dan Beban.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk

menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan yang terutama ditujukan kepada anggota (Ridho : 16).

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akuntansi terakhir. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu (paragraf 57). Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota (paragraf 58). Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu (paragraf 60).

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (paragraf 62). Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian

dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu (paragraf 65).

2. Aset

a. Pengertian Aset

Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (Ghozali dan Chariri, 2007: 230). Sesuatu dianggap sebagai aset jika di masa yang akan datang dapat diharapkan memberikan *net cash inflow* yang positif kepada perusahaan/ koperasi.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aset

Aset dalam koperasi dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 45). Aset- aset yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 47). Pencatatan aset didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aset itu dari pihak lain. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aset bukan uang, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan (Harahap, 2001: 207).

3. Kewajiban

a. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (IAI dalam Ghozali dan Chariri, 2001: 258).

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya (paragraf 43). Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban (paragraf 44). Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai kewajiban kepada anggota, sedangkan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan non-anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK yang berlaku. Simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya (Ridho 2007: 34).

4. Ekuitas

a. Pengertian ekuitas

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok,

simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan Sisa Hasil Usaha belum dibagi (paragraf 18). Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu (paragraf 21).

Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi (paragraf 17). Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan (paragraf 17).

Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau ketetapan rapat anggota (paragraf 17). Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi (paragraf 17).

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya (paragraf 19).

Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam praktiknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu-waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas (paragraf 22). Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib (paragraf 24). Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota (paragraf 26).

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima (paragraf 29). Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas (paragraf 30). Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat

digunakan nilai taksiran.

Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan (paragraf 31). Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 32). Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 33). Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 36).

Sisa Hasil Usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai Sisa Hasil Usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 40). Pembagian Sisa Hasil Usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam AD/ART tetapi harus menunggu rapat anggota, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai Sisa

Hasil Usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 42).

5. Pendapatan dan Beban

a. Pengertian Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

IAI dalam PSAK No. 23 tahun 2007 menyatakan, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2) Beban

IAI dalam PSAK (2007: 18) menyatakan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Sesuai dengan konsep penandingan, maka beban akan saling berhubungan dengan pendapatan. Beban usaha merupakan sejumlah uang atau aset lainnya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka untuk kegiatan operasional koperasi sehari-hari. Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban perkoperasian adalah beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Beban yang termasuk beban

perkoperasian yaitu beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha, dan beban iuran untuk gerakan koperasi (paragraf 55). Penyajian beban perkoperasian dalam laporan perhitungan hasil usaha disajikan terpisah dengan beban usaha dalam kelompok beban operasi.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

Pendapatan diukur sebesar nilai tukar produk atau jasa yang akan diterima. Pendapatan atau transaksi yang terjadi dengan pihak ketiga, diukur sebesar nilai wajar penjualan yang menggambarkan nilai kas sekarang. Nilai kas sekarang adalah nilai kas yang sebenarnya diterima atau akan diterima atau harga pasar yang berlaku atau pada saat transaksi dikurangi dengan potongan tunai, diskonto dagang (rabat), volume yang diperbolehkan dari jumlah yang difakturkan dan dikurangi dengan penyisihan untuk mengantisipasi kerugian. Oleh karena itu, pendapatan diukur pada saat adanya kepastian dari jumlah yang akan diterima.

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto (paragraf 49). Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota (paragraf 51). Pendapatan yang realisasi

penerimaannya belum pasti, dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam kelompok aset lancar.

2) Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, yaitu sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Beban disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha, dimulai dari beban yang merupakan usaha pokok koperasi sampai dengan beban yang bukan merupakan usaha pokok koperasi. Menurut Baridwan (2000: 309-310), beban penyusutan yang terjadi diukur (ditentukan) dengan metode penaksiran tertentu, seperti metode garis lurus. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai beban meliputi metode pengakuan beban dan metode alokasi beban kepada anggota dan non-anggota. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha (paragraf 54).

2.3.3. Kelengkapan Pengungkapan Wajib

Kelengkapan merupakan salah satu bentuk dari kualitas. Menurut Imhoff (1992) dalam Ridho (2007: 40), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan tahunan.

Chariri dan Ghazali (2007: 377) mengemukakan kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data,

disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat karena apabila tidak bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai.

Disclosure jika dikaitkan dengan laporan keuangan, mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan.

Tiga konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan menurut Chariri dan Ghozali (2007: 378) adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

2. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*)

Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*)

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua

informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, pengungkapan yang lengkap ini diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami (Hendriksen dan Breda dalam Chariri dan Ghozali, 2007: 378).

Darrough (1993) dalam Ridho (2007) mengemukakan, ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan tahunan yang ditetapkan oleh IAI dalam PSAK No. 27 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca menyajikan dan mengungkapkan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Penyajian aset dalam neraca dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan

aset lain-lain. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan non-anggota. Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan SISA HASIL USAHA belum dibagi.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha menyajikan dan mengungkapkan informasi mengenai pendapatan, beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto dan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Beban yang ada di koperasi meliputi beban pokok kepada anggota, beban pokok penjualan kepada non-anggota, beban operasi yang terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian, serta beban lain yang tidak termasuk pada kelompok tersebut.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas

pada periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

IAI dalam PSAK No. 2 tahun 2007 menyatakan laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*).

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 - b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
 - c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 - d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha.
5. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat antara lain:
- a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 - 2) Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
- b. Pengungkapan informasi lain:
- 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam AD dan ART maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai dalam koperasi.
 - 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
 - 3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 - 4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 - 5) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
 - 6) Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
 - 7) Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
 - 8) Penggunaan Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan.

- 9) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- 10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.4 Kerangka Berfikir

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Koperasi sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional, merupakan salah satu alat untuk memberdayakan potensi rakyat dengan basis kebersamaan. Keberadaan Koperasi telah lama mengakar di masyarakat dan ketangguhannya bertahan hidup di tengah-tengah krisis ekonomi telah menggugah Pemerintah dan para pengambil keputusan untuk menjadikan koperasi sebagai modal penataan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sebagai bagian dari kebijakan nasional perekonomian nasional (Ir. Victor :7). Koperasi sebagai sebuah badan usaha mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang berarti koperasi memiliki dimensi ekonomi. Tujuan tersebut tidak akan terlepas dari usaha untuk melakukan pengembangan koperasi.

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah maklum bahwa perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini bila dilihat dari segi kuantitas memang sangat menggembirakan, tetapi dari segi kualitas masih sangat memprihatinkan (Pandji dan Widiyanti : 142). Koperasi sebagai sebuah Badan Usaha, harus melaksanakan

fungsi-fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian, sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma koperasi. Koperasi juga harus bisa bekerja mengikuti kaidah-kaidah usaha ekonomi, yaitu efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi anggotanya agar tercapainya perkembangan koperasi yang diharapkan. Perkembangan koperasi akan selalu terikat dengan perkembangan usahanya, bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan usaha koperasi, sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi tersebut. Kondisi keuangan tersebut dapat diketahui melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan koperasi selain sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan, juga merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan jika dilihat dari fungsi manajemen, dapat menjadi salah satu alat evaluasi pertumbuhan koperasi. Kesesuaian laporan keuangan dengan suatu standar akuntansi khusus yang telah ditetapkan, maka laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi tolak ukur perkembangan koperasi secara kualitas dan penilaian profesionalisme para pengelolanya.

Koperasi sebagai sebuah badan usaha milik umum, harus menerapkan *good governance* sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Pertanggungjawaban koperasi harus dijadikan dasar bagi upaya penataan kelembagaan dan penataan usaha. Kepercayaan anggota dan masyarakat dalam menilai kinerja koperasi akan meningkat jika sistem pertanggungjawabannya baik

(Kememnterian Koperasi dan UKM RI 2002:2). Tingkat kepercayaan anggota yang tinggi pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi anggota koperasi karena masyarakat atau anggota lebih mampu memprediksi kinerja koperasi dan sekaligus merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya.

Peningkatan dalam sistem pertanggungjawaban koperasi yang mengacu pada suatu standar akuntansi khusus koperasi diharapkan mampu mendorong koperasi untuk berusaha secara efisien dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam kegiatan usahanya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha koperasi meliputi tingkat perkembangan volume usaha, tingkat perkembangan *net asset*, dan Sisa Hasil Usaha.

Laporan keuangan koperasi harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian, agar laporan keuangan dapat dipahami dengan benar dan dimanfaatkan secara optimal. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi (Widodo, 2004:1). Koperasi yang menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian berarti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan dengan memperhatikan karakteristik koperasi sehingga dapat menggambarkan kemajuan atau pertumbuhan usaha koperasi. Menurut Tati Suhartati Joesron (2005:94), dalam menilai kinerja keberhasilan koperasi perlu dibedakan dengan badan usaha lain karena koperasi mempunyai karakteristik khusus, untuk itu dalam menilai kinerja

keberhasilan koperasi sudah seharusnya mengacu pada standar akuntansi keuangan khusus koperasi. Standar keuangan yang sekarang berlaku untuk koperasi sebagai sebuah Lembaga Ekonomi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian.

Standar Akuntansi Keuangan adalah pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya adalah sangat penting, agar laporan keuangan lebih berguna dan dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994). Adanya suatu standar dalam penyusunan laporan keuangan akan membuat pemakai informasi laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal dapat memahami kondisi keuangan koperasi yang sebenarnya. Kenyataannya tidak semua koperasi mampu menyusun sebuah laporan keuangan yang benar-benar memperlihatkan kondisi koperasi secara menyeluruh.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, kondisi sebenarnya di lapangan ternyata menunjukkan bahwa koperasi-koperasi termasuk KPRI di Purbalingga belum sepenuhnya dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian secara memadai. Masih banyak koperasi-koperasi yang belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. KPRI belum menyusun laporan arus kas, dan laporan promosi ekonomi anggota. Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang disusun juga tidak memisahkan antara pendapatan dari anggota dan non-anggota, beban-beban koperasi yang timbul juga tidak dipisahkan antara beban usaha dan

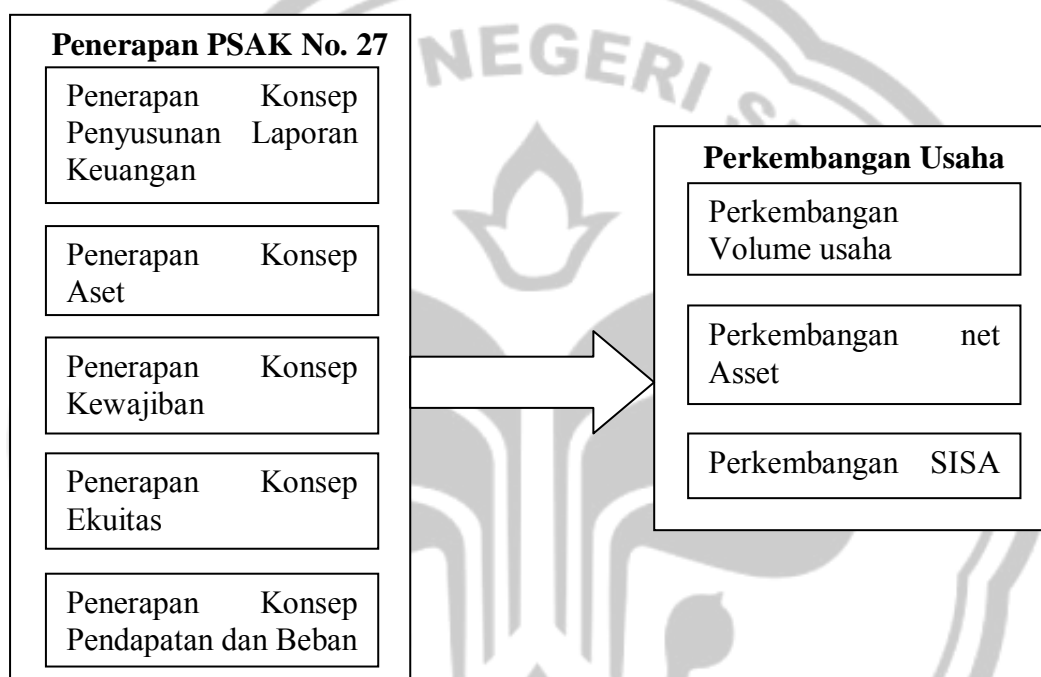
beban perkoperasian. Kondisi seperti ini akan sangat merugikan bagi perkembangan koperasi secara umum, karena akan dianggap sebagai sebuah lembaga yang tidak mampu memperlihatkan kemampuannya menyajikan informasi laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan koperasi.

Penelitian mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi telah banyak dilakukan. Faiqotul Himah (UMS 2009) yaitu tentang analisis penerapan penyajian laporan keuangan koperasi menurut PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian (suatu survey di Klaten). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa koperasi-koperasi di Klaten sudah sesuai dengan yang dikehendaki Standar Akuntansi Keuangan (SAK) walau pelaksanaannya belum maksimal. Penelitian Rakhmawati (2007) yang meneliti penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kota Kendal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi sudah cukup baik, namun masih terdapat perbedaan dalam penerapannya.

Adanya ketidaksesuaian dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian memungkinkan para pemakai informasi keuangan koperasi kurang percaya terhadap kinerja koperasi, partisipasi anggota dan masyarakat akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi laju perkembangan usaha koperasi yang dapat dilihat dari perkembangan volume usaha, tingkat perkembangan aset, dan Sisa Hasil Usaha. Penelitian ini mencoba untuk meneliti

kembali penelitian Rakhmawati (2007) yang meneliti penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kota Kendal. Perbedaan ini terletak pada objek penelitian yang lain yaitu KPRI di Kabupaten Purbalingga, dan tahun penelitiannya yaitu tahun 2008-2009.

Kerangka berpikir penelitiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis

Berdasar kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut:

“Ada Pengaruh Penerapan PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian Terhadap Perkembangan Usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) yang terdapat di Kabupaten Purbalingga yang telah berbadan hukum dan terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga. Jumlah keseluruhan KPRI yang ada di Kabupaten purbalingga adalah sebanyak 56, dengan rincian 54 KPRI aktif dan 2 KPRI tidak aktif melaksanakan kegiatan operasional lagi, maka populasinya adalah 54 KPRI.

Tabel 3.1. Daftar KPRI di Kabupaten Purbalingga

No	KPRI	No	KPRI	No	KPRI
1	AL-BARCAH	19	BINA SEJAHTERA	37	BUDI MANUNGGAL
2	HIMPUN	20	DEWI SRI	38	IMEGA
3	AUB	21	E K A	39	JELITA
4	BAHTERA	22	GUYUB	40	K3P
5	BHAKTI PRAJA	23	GUYUB RUKUN	41	KERTA PRAJA
6	CARAKA	24	MUSTAKA	42	SEHATI
7	KESUMA DIPENDA	25	NGESTI BINA MULYA	43	WARGA BINA SATWA
8	KUSUMA	26	MUSTAQIEM	44	SEJATI
9	LUHUR	27	PANCA MARGA	45	SEKAR
10	MAKARTI	28	PENGAYOMAN	46	SERBAGUNA
11	MARGA BHAKTI	29	PERGUA	47	SETIA MARGA
12	MAS	30	PERMEGA	48	SETIA BUDI
13	MEGA	31	RAHAYU	49	SIAP
14	MEGAR	32	R A S	50	TEGAP
15	MEKAR	33	SAKETI	51	TERUBUS
16	MEKARSARI	34	PERWIRA	52	TRI MARGA
17	MEMPENG	35	SEDAR	53	WANTEG
18	MESTIKA	36	SEGAR	54	WARGA

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

3.1.2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*, dengan kriteria:

- a. Berbadan hukum dan terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Purbalingga.
- b. Aktif melakukan kegiatan operasional koperasi.
- c. Menyertakan laporan keuangan koperasi yang lengkap selama 2 tahun berturut-turut pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Purbalingga.

Prosedur pemilihan sampel dapat diuraikan sebagai berikut:

– Koperasi yang Berbadan hukum dan terdaftar	56
– Tidak aktif melakukan kegiatan operasional koperasi	(2)
– Tidak menyertakan laporan keuangan koperasi yang lengkap selama 2 tahun berturut-turut	(20)
– Total sampel	24

Jumlah KPRI yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 KPRI.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Perkembangan Usaha (Y)

Perkembangan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan dilihat dari volume usaha, *net asset* dan laba bersih. Indikator perkembangan usaha adalah:

- a. Perkembangan volume usaha tahun 2008-2009, diperoleh dari penjualan dan pendapatan selama satu periode
- b. Perkembangan *net asset* tahun 2008-2009
- c. Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2008-2009.

3.2.2 Penerapan PSAK No. 27 (X)

Penerapan prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi. Indikator penerapan PSAK No. 27 adalah:

- a. Penerapan konsep penyusunan laporan keuangan
- b. Penerapan konsep aset
- c. Penerapan konsep kewajiban
- d. Penerapan konsep ekuitas
- e. Penerapan konsep pendapatan dan beban

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melengkapi format atau blangko pengamatan yang sudah tersedia. Blangko pengamatan ini diisi berdasarkan data dari laporan keuangan koperasi yang dijadikan sampel. Blangko pengamatan berdasarkan dari instrumen yang dikembangkan oleh Rakhmawati (2007) dengan melakukan penyempurnaan.

Variabel perkembangan usaha diperoleh dari volume usaha tahun 2008-2009, *net asset* tahun 2008-2009, dan total Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2008-2009 yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi. Variabel penerapan PSAK No. 27 diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu penerapan konsep penyusunan laporan keuangan, penerapan konsep aset, penerapan konsep kewajiban, penerapan konsep ekuitas, serta penerapan konsep pendapatan dan beban. Skala yang digunakan yaitu skala Guttman, dimana setiap jawaban ya bernilai 1 (satu) dan tidak bernilai (no) dengan melihat ketersediaan jawaban berdasarkan laporan keuangan koperasi.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Analisis ini menyediakan nilai frekuensi, pengukuran tendensi pusat (*measure of central tendency*) dan dispersi.

3.4.1.1. Tingkat perkembangan Usaha

Tingkat perkembangan usaha yang terdiri dari tingkat perkembangan volume usaha, perkembangan *net asset*, dan perkembangan SHU diukur secara kuantitatif yaitu dengan cara:

- a. Perkembangan volume usaha

$$= \frac{\text{Total volume usaha tahun 2009}}{\text{Total volume usaha tahun 2008}} \times 100\%$$

b. Perkembangan net asset

$$= \frac{\text{Total net asset tahun 2009}}{\text{Total net asset tahun 2008}} \times 100\%$$

c. Perkembangan SHU

$$= \frac{\text{Total SHU tahun 2009}}{\text{Total SHU tahun 2008}} \times 100\%$$

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya perkembangan sesungguhnya dengan standar perkembangan koperasi yang telah ditetapkan oleh Dep. Kop. PK&M yaitu sebesar 110% (DEP. KOP. PPK RI No. 20/PPK/1997). Apabila ratio perkembangannya sama dengan atau lebih besar dari yang telah ditetapkan, maka koperasi tersebut mengalami perkembangan, deskripsi (Skala: nominal) dapat dikategorikan menjadi (1) Tidak berkembang (<110%), (2) Berkembang ($\geq 110\%$).

3.4.1.2. Tingkat Penerapan PSAK No. 27

Deskriptif persentase digunakan untuk mengkaji dan mengukur prosentase Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi pada KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009. Masing-masing indikator diukur dengan pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban ya dan tidak. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya diberi skor 1, sedangkan pertanyaan dengan jawaban tidak diberi skor 0. Tingkat presentase skor jawaban dapat diketahui secara tepat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

n = skor empirik (skor yang diperoleh)

N = jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal)

% = tingkat keberhasilan yang dicapai

Perhitungan deskriptif presentase ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan persentase maksimal yaitu 100%
- b. Menentukan persentase minimal 0%
- c. Menentukan rentang presentase (r %), diperoleh dari pengurangan presentase minimal terhadap presentase maksimal, maka didapatkan $100\% - 0\% = 100\%$.
- d. Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian kriteria terhadap rentang persentase, maka didapatkan $100\% : 5 = 20\%$
- e. Menentukan kriteria, yaitu: sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik (Sudjana :47).

Masing-masing indikator dapat dikategorikan menjadi :

Tabel 3.2 Kriteria Penerapan PSAK No. 27

No.	Rentang Presentase	Kriteria
1	80% - 100%	Sangat Baik
2	60% - 79%	Baik
3	40% - 59%	Cukup Baik
4	20% - 39%	Tidak Baik
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik

3.4.2. Analisis Regresi

Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Uji

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependent dan variabel independent keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk menguji atau mendeteksi normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai K-S Z signifikan maka data yang ada tidak terdistribusi secara normal.

Uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan grafik normal plot dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006).

Setelah melakukan uji normalitas, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini digunakan untuk mencari persamaan regresi atau pengaruh antara penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian terhadap perkembangan usaha Koperasi.

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Perkembangan usaha koperasi

a = Konstanta regresi

b = Koefisien regresi

X = Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 tentang Akuntansi Perkoperasian

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan Program SPSS *windows release* 17. kriteria pengujian hipotesis didasarkan atas nilai *p-value* yang dihasilkan output SPSS dimana nilai *p-value* dikatakan signifikan jika lebih kecil atau sama dengan 0,05 (*p-value* = 0,05). Jika koefisien b menunjukkan angka positif dan signifikan (*p-value* = 0,05) berarti penerapan PSAK No. 27 berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha koperasi sehingga hipotesis pertama dapat diterima, tetapi jika tidak maka hipotesis pertama ditolak.

3.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu, maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Purbalingga

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah koperasi yang berbadan hukum dan tercatat di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 56 KPRI, dengan rincian 54 KPRI masih aktif dan 2 KPRI yang sudah dinyatakan tidak beroperasi. Sejumlah KPRI tersebut, masing-masing berkedudukan di instansi-instansi pemerintah, yaitu kantor pemerintah, kantor dinas, sekolah-sekolah, serta yang tidak berada di dalam instansi pemerintah yang tersebar di Kabupaten Purbalingga. Peneliti mengambil 24 KPRI sebagai sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dari seluruh KPRI yang ada di Purbalingga.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang sebelumnya bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian nama KPN dirubah menjadi KPRI. KPRI Kabupaten Purbalingga merupakan koperasi yang didirikan untuk memelihara kepentingan anggota dan memenuhi kebutuhan para anggota (pegawai negeri). KPRI diharapkan mampu untuk meringankan beban pegawai negeri dalam

memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk wadah sebagai sarana pendidikan anggota agar tumbuh menjadi insane koperasi yang berjiwa wirausaha.

4.1.2. Deskriptif variabel Penelitian

4.1.2.1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KPRI di Kabupaten Purbalingga

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi koperasi pada KPRI di Kabupaten Purbalingga secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Berikut disajikan gambaran umum penerapan PSAK No. 27 berdasarkan data hasil penelitian.

Tabel 4.1 Gambaran Umum Penerapan PSAK No. 27 pada KPRI di Kabupaten Purbalingga

No.	Rentang Presentase	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	80% - 100%	Sangat Baik	0	0%
2	60% - 79%	Baik	21	87.50%
3	40% - 59%	Cukup Baik	3	12.50%
4	20% - 39%	Tidak Baik	0	0
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0
	Total		24	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa dari 24 KPRI di Kabupaten Purbalingga yang diteliti terdapat 21 KPRI (87,50%) telah menerapkan PSAK No. 27 dengan kategori baik, dan 3 KPRI (12,50%) dalam kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar KPRI di Kabupaten Purbalingga telah menerapkan

konsep penyusunan laporan keuangan, konsep aset, konsep kewajiban, konsep ekuitas dan konsep pendapatan dan beban dengan baik.

1. Penerapan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan pada KPRI di Kabupaten Purbalingga secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Berikut disajikan gambaran umum penerapan konsep penyusunan laporan keuangan berdasarkan data hasil penelitian.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Penerapan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan pada KPRI Kabupaten Purbalingga

No.	Rentang Presentase	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	80% - 100%	Sangat Baik	17	70.83%
2	60% - 79%	Baik	7	29.17%
3	40% - 59%	Cukup Baik	0	0
4	20% - 39%	Tidak Baik	0	0
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0
Total			24	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa dari 24 KPRI di Kabupaten Purbalingga yang diteliti terdapat 17 KPRI (70,83%) telah menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori sangat baik, dan 7 KPRI (29,17%) dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar KPRI di Kabupaten Purbalingga telah menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kriteria sangat baik.

Terlihat dari tabel 4.3 di bawah, sebagian besar KPRI telah melakukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 27, dimana laporan keuangan yang berupa Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha telah dilaksanakan oleh semua KPRI. Beberapa hal yang belum disajikan dengan baik yaitu berkaitan dengan penyajian arus kas. Hasil penelitian menunjukkan, hanya 17 (71%) KPRI saja yang melakukan penyajian laporan arus kas, dan 17 KPRI tersebut telah melakukan penyajian laporan arus kas meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Seluruh KPRI yang diteliti tidak ada yang menyajikan laporan promosi ekonomi anggota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemisahan pos penghasilan yang berasal dari anggota dan non-anggota juga tidak disajikan dalam laporan keuangan koperasi, bahkan terkait dimuatnya laba atau rugi kotor dengan non-anggota tidak ada yang mencantulkannya dalam laporan keuangan koperasi. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	F	%
1	Neraca	24	100%
2	perhitungan hasil usaha	24	100%
3	laporan arus kas	17	71%
4	Laporan Promosi Ekonomi anggota	0	0%
5	informasi mengenai aset sesuai dengan PSAK koperasi	24	100%
6	informasi mengenai kewajiban sesuai dengan PSAK koperasi	24	100%
7	informasi mengenai ekuitas sesuai dengan PSAK koperasi	22	92%
8	perhitungan hasil usaha telah memisahkan pos penghasilan yang berasal dari anggota dan non-anggota	0	0%
9	perhitungan hasil usaha telah memuat laba atau rugi kotor dengan non-anggota?	0	0%
10	laporan arus kas sudah meliputi saldo awal kas,	17	71%

	sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo akhir kas pada periode tertentu?		
11	Dalam hal SHU tahun berjalan belum dibagi, manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian SHU pada akhir tahun buku, dicatat sebesar taksiran jumlah SHU yang akan dibagi untuk anggota	24	100%
12	catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari aset	24	100%
13	catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari kewajiban?	24	100%
14	catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari ekuitas	24	100%
15	catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari pendapatan dan beban	24	100%

Sumber: Data Primer diolah 2010

2. Penerapan Konsep Aset

Penerapan Konsep Aset pada KPRI di Kabupaten Purbalingga secara umum sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Berikut disajikan gambaran umum penerapan konsep penyusunan laporan keuangan berdasarkan data hasil penelitian.

Tabel 4.4 Gambaran Umum Penerapan Konsep Aset pada KPRI Kabupaten Purbalingga

No.	Rentang Presentase	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	80% - 100%	Sangat Baik	2	8.33%
2	60% - 79%	Baik	12	50%
3	40% - 59%	Cukup Baik	10	41.67%
4	20% - 39%	Tidak Baik	0	0%
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0%
	Total		24	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa dari 38 KPRI di Kabupaten Purbalingga yang diteliti terdapat 2 KPRI (8,33%) telah menerapkan konsep Aset sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori sangat baik, dan 12 KPRI (50%) dalam kategori baik, dan 10 KPRI (41,67%) dalam kategori cukup. Hal ini berarti bahwa sebagian besar KPRI di Kabupaten Purbalingga telah menerapkan konsep aset sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kriteria baik.

Terlihat dari tabel 4.5 di bawah, sebagian besar KPRI telah melakukan penerapan konsep aset sesuai dengan PSAK No. 27, Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian pada Koperasi diakui sebagai aset lain-lain telah disajikan 12 KPRI (50%), penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan telah disajikan 9 KPRI (38%). Penyajian aset-aset yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi hanya dilakukan oleh 20 KPRI (83%), penjelasan aset-aset yang dikelola oleh koperasi dalam catatan atas laporan keuangan dilakukan oleh 23 KPRI (96%). Pemisahan aset menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain telah dilakukan oleh semua KPRI yang diteliti, tetapi pemisahan piutang pinjaman anggota dan non-anggota tidak dilakukan oleh seluruh KPRI yang diteliti. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Aset

No	Pertanyaan	F	%
1	Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian pada Koperasi diakui sebagai aset lain-lain	12	50%
2	aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	9	38%
3	aset-aset yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan	20	83%

	milik koperasi tidak diakui sebagai aset		
4	aset-aset yang dikelola oleh koperasi, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	23	96%
5	aset koperasi sudah dipisahkan antara aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain	24	100%
6	pemisahan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman pinjaman non-anggota	0	0%

Sumber: Data diolah, 2010

3. Penerapan Konsep Kewajiban

Penerapan Konsep Kewajiban pada KPRI di Kabupaten Purbalingga secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Berikut disajikan gambaran umum penerapan konsep penyusunan laporan keuangan berdasarkan data hasil penelitian.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa dari 24 KPRI di Kabupaten Purbalingga yang diteliti terdapat 19 KPRI (79,17%) telah menerapkan konsep kewajiban sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori baik, dan 5 KPRI (20,83%) dalam kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar KPRI di Kabupaten Purbalingga telah menerapkan konsep kewajiban sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori baik, meskipun ada beberapa yang berada dalam taraf sangat cukup baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari table distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.6 Gambaran Umum Penerapan Konsep Kewajiban pada KPRI Kabupaten Purbalingga

No.	Rentang Presentase	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	80% - 100%	Sangat Baik	0	0%
2	60% - 79%	Baik	19	79.17%
3	40% - 59%	Cukup Baik	0	0

4	20% - 39%	Tidak Baik	5	20.83%
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0%
	Total		24	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

Terlihat dari tabel 4.7 di bawah, sebagian besar KPRI telah melakukan penerapan konsep kewajiban sesuai dengan PSAK No. 27, simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai tanggal jatuh tempo telah disajikan 19 KPRI (79%), pencatatan simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, dicatat sebesar nilai nominalnya telah disajikan 24 KPRI (100%). Pemisahan hutang simpanan anggota dan non-anggota tidak ada satupun dari KPRI yang diteliti menyajikannya.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Kewajiban

No	Pertanyaan	F	%
1	Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo	19	79%
2	Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, dicatat sebesar nilai nominalnya	24	100%
3	Pemisahan hutang simpanan anggota dan non-anggota	0	0%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

4. Penerapan konsep Ekuitas

Penerapan Konsep Ekuitas pada KPRI di Kabupaten Purbalingga secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Berikut disajikan gambaran umum penerapan konsep penyusunan laporan keuangan berdasarkan data hasil penelitian.

Tabel 4.8 Gambaran Umum Penerapan Konsep Ekuitas pada KPRI Kabupaten Purbalingga

No.	Rentang Presentase	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	80% - 100%	Sangat Baik	0	0%
2	60% - 79%	Baik	19	79.17%
3	40% - 59%	Cukup Baik	5	20.83%
4	20% - 39%	Tidak Baik	0	0%
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0%
	Total		24	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

Tabel 4.8 menunjukkan dari 24 KPRI di Kabupaten Purbalingga terdapat 19 KPRI (79,17%) telah menerapkan konsep Ekuitas sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori baik, dan 5 KPRI (20,83%) dalam kategori cukup baik. Disimpulkan bahwa sebagian besar KPRI di Kabupaten Purbalingga telah menerapkan konsep ekuitas sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori baik.

Tabel 4.9 di bawah, hampir semua KPRI telah menerapkan konsep ekuitas sesuai dengan PSAK, ada beberapa hal yang masih belum terlaksana antara lain:

- 1) Penyajian simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota, disajikan sebagai piutang simpanan pokok atau simpanan wajib, masing-masing dilaksanakan oleh 4 KPRI (17%).
- 2) Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyeteraan partisipasi anggota, masing-masing hanya dilaksanakan oleh 0 KPRI (0%) dan 2 KPRI (8%).

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Penerapan Konsep Ekuitas

No	Pertanyaan	F	%
1	Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi	23	96%
2	Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain dari anggota yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, dicatat sebesar nilai nominalnya	24	100%
3	Simpanan pokok yang belum diterima dari anggota, disajikan sebagai piutang simpanan pokok	4	17%
4	Simpanan wajib yang belum diterima dari anggota, disajikan sebagai piutang simpanan wajib	4	17%
5	Kelebihan setoran simpanan pokok anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok anggota pendiri, diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota	0	0%
6	Kelebihan setoran simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan wajib anggota pendiri, diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota	2	8%
7	Modal penyetaraan yang berupa uang atau barang yang ditanamkan oleh pemodal untuk meningkatkan usaha koperasi, diakui sebagai ekuitas	24	100%
8	Modal penyertaan, dicatat sebesar jumlah nilai nominal setoran	21	88%
9	Modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, dicatat sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima	19	79%
10	Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	24	87%
11	Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian, diakui sebagai ekuitas	24	71%
12	Modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjaman, diakui sebagai kewajiban jangka panjang	14	58%
13	Modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjaman, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	16	67%
14	Sebagian dari Sisa Hasil Usaha disisihkan sebagai cadangan	24	100%
15	Cadangan dan tujuan penggunaannya, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	20	83%
16	Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain, dibebankan pada cadangan	24	100%
17	SHU tahun berjalan, dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi	24	100%
18	Dalam hal jenis dan jumlah pembagian hasil usaha telah diatur	5	21%

	secara jelas, maka bagian yang menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban		
19	SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas, dicatat sebagai SHU belum dibagi	4	17%
20	SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?	9	38%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

5. Penerapan Konsep Pendapatan dan Beban

Penerapan Konsep Pendapatan dan Beban pada KPRI di Kabupaten Purbalingga secara umum dilaksanakan dengan cukup baik. Berikut disajikan gambaran umum penerapan konsep penyusunan laporan keuangan berdasarkan data hasil penelitian.

Tabel 4.10 Gambaran Umum Penerapan Konsep Pendapatan Dan Beban pada KPRI Kabupaten Purbalingga

No.	Rentang Presentase	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	80% - 100%	Sangat Baik	11	45.83%
2	60% - 79%	Baik	5	20.83%
3	40% - 59%	Cukup Baik	6	25.00%
4	20% - 39%	Tidak Baik	2	8.33%
5	0% - 19%	Sangat Tidak Baik	0	0%
	Total		24	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa dari 24 KPRI di Kabupaten Purbalingga yang diteliti terdapat 11 KPRI (45,83%) telah menerapkan konsep pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK No. 27 dengan kategori sangat baik, dan 5 KPRI (20,83%) dalam kategori baik, 6 KPRI (25%) dalam kategori cukup dan 2 KPRI (8,33%) dalam keadaan yang tidak baik. Hal ini berarti bahwa

sebagian besar KPRI di Kabupaten Purbalingga belum menerapkan konsep pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK No. 27.

Terlihat dari tabel 4.11 di bawah, sebagian besar KPRI sudah menerapkan konsep pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK, terbukti dengan pengakuan pendapatan dari transaksi dengan non-anggota dilakukan oleh 23 KPRI (95,83%), pemisahan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi yang timbul dari anggota dan non-anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha tidak dilakukan oleh seluruh KPRI. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota, juga tidak dilakukan oleh seluruh KPRI. Pemisahan beban usaha dan beban perkoperasian dalam laporan perhitungan hasil usaha hanya dilakukan oleh 10 KPRI (41,67%), tetapi pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota dicatat sebesar nilai transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha, dilakukan oleh 24 KPRI (100%) dan 24 KPRI (100%) yang menerapkan pendapatan koperasi yang timbul dari anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.11 Distribusi frekuensi penerapan konsep pendapatan dan beban

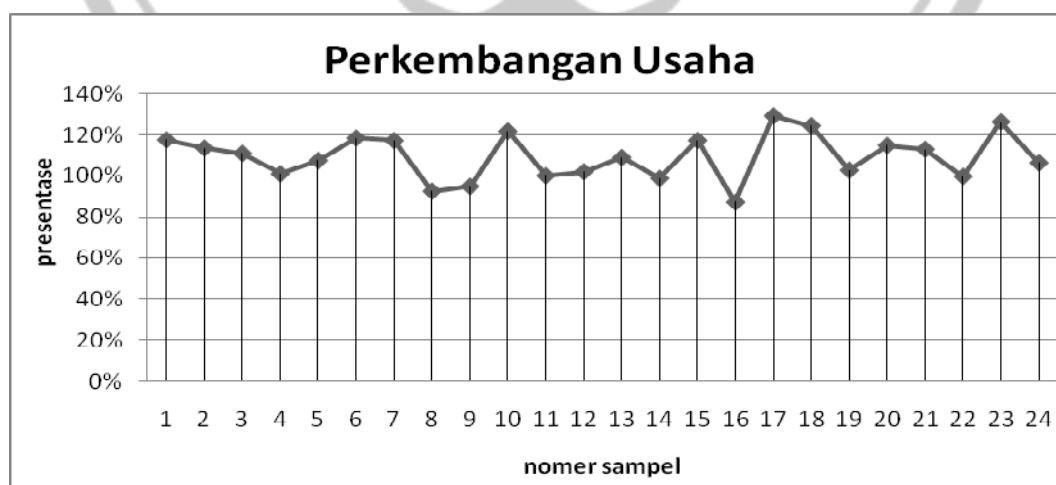
No	Pertanyaan	F	%
1	Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto	24	100%
2	Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, diakui sebagai pendapatan (penjualan)	23	95.83%
3	pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, dilaporkan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha	0	0%
4	Dalam pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, dicatat sebesar nilai transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha	24	100%

5	selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota, diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota	0	0%
6	beban usaha dan beban perkoperasian, disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha	10	41.67%

Sumber: Data Primer diolah, 2010

4.1.2.2. Perkembangan Usaha

Menurut Dep. Kop. PK & M, perkembangan koperasi merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan dilihat dari volume usaha, net asset dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Perkembangan usaha tahun 2009 dihitung dengan cara membandingkan antara total volume usaha, net asset dan SHU tahun 2009 dengan tahun 2008. Dari perbandingan tersebut kemudian diambil rata-rata dari ketiga komponen tersebut sehingga diperoleh rasio perkembangan usaha yang kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dep. Kop. PK&M sebesar 110%. Apabila ratio perkembangannya sama dengan atau lebih besar dari yang telah ditetapkan, maka koperasi tersebut mengalami perkembangan. Mengenai perkembangan usaha pada KPRI Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 dapat dilihat pada grafik berikut:

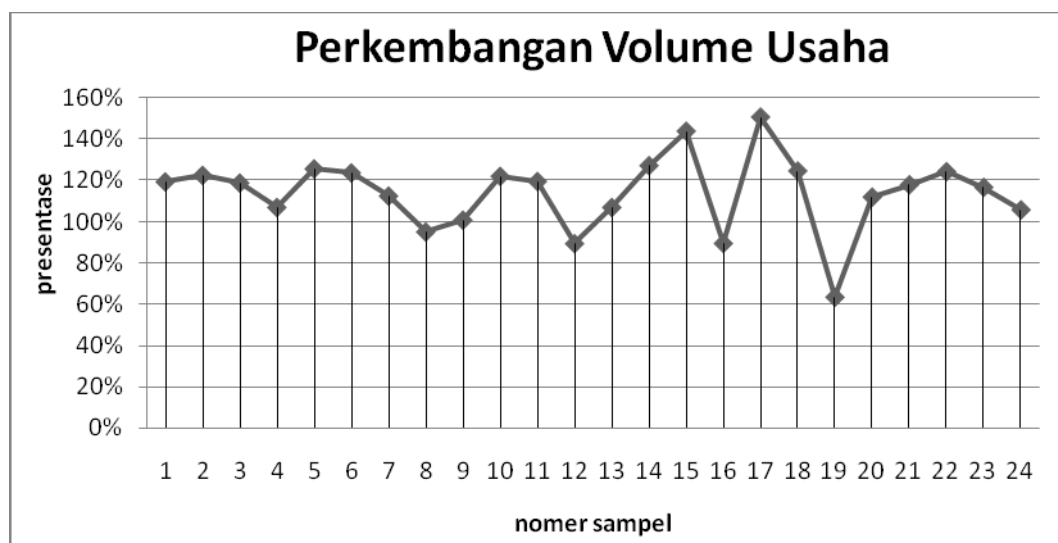


Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui dari keseluruhan KPRI yang diambil sebagai sampel, sebanyak 12 KPRI (50%) mempunyai perkembangan dengan kategori rendah atau dibawah 110% dan 12 KPRI (50%) dalam kategori tinggi. KPRI dengan perkembangan usaha tertinggi adalah KPRI Bahtera (Nomer sampel 17) dengan perkembangan sebesar 129,11%, sedangkan KPRI dengan perkembangan usaha paling rendah adalah KPRI Sedar (nomer sampel 16) dengan perkembangan sebesar 87,37%. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata tingkat perkembangan usaha KPRI di Kabupaten Purbalinga tahun 2008-2009 tergolong kategori rendah dengan rata-rata perkembangan sebesar 109,43%.

1) Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio dan Tamba 2001: 142). Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa dari awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku dalam satu periode. Besarnya volume usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 sebagai berikut:

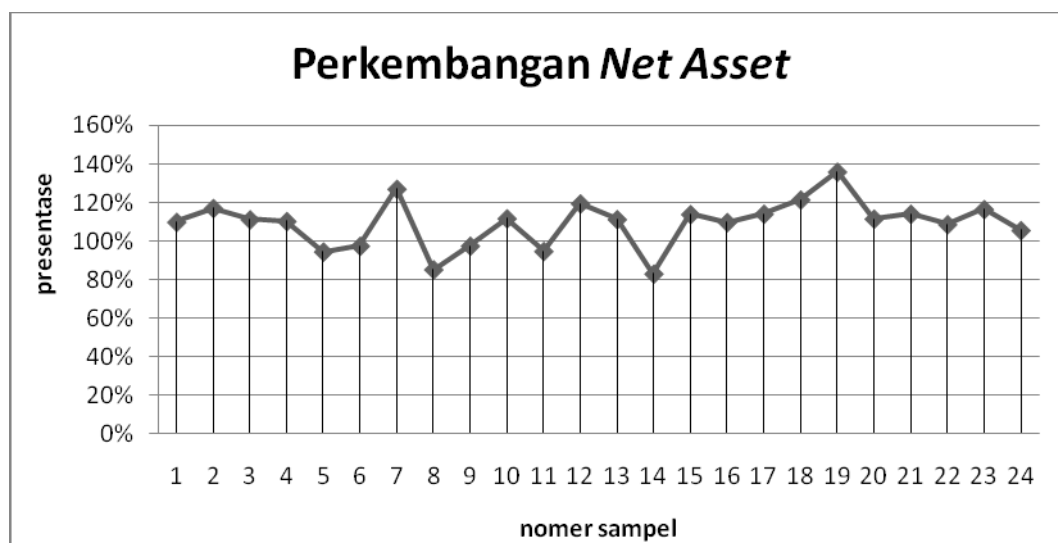


Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Volume Usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan gambar 4.2, dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan volume usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 termasuk kategori tinggi dengan rata-rata perkembangan mencapai 114,06%. Dari keseluruhan KPRI yang dijadikan sebagai sampel, 16 KPRI (66,67%) mempunyai tingkat perkembangan volume usaha dengan kategori tinggi dan 8 KPRI (33,33%) dalam kategori rendah. Perkembangan volume usaha tertinggi mencapai 150,57% pada KPRI Guyub Rukun dan perkembangan volume usaha terendah mencapai 63,51% pada KPRI Kerta Praja.

2) *Net Asset*

Net asset adalah kekayaan bersih atau modal sendiri KPRI Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan donasi. Secara keseluruhan besarnya net asset KPRI Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:



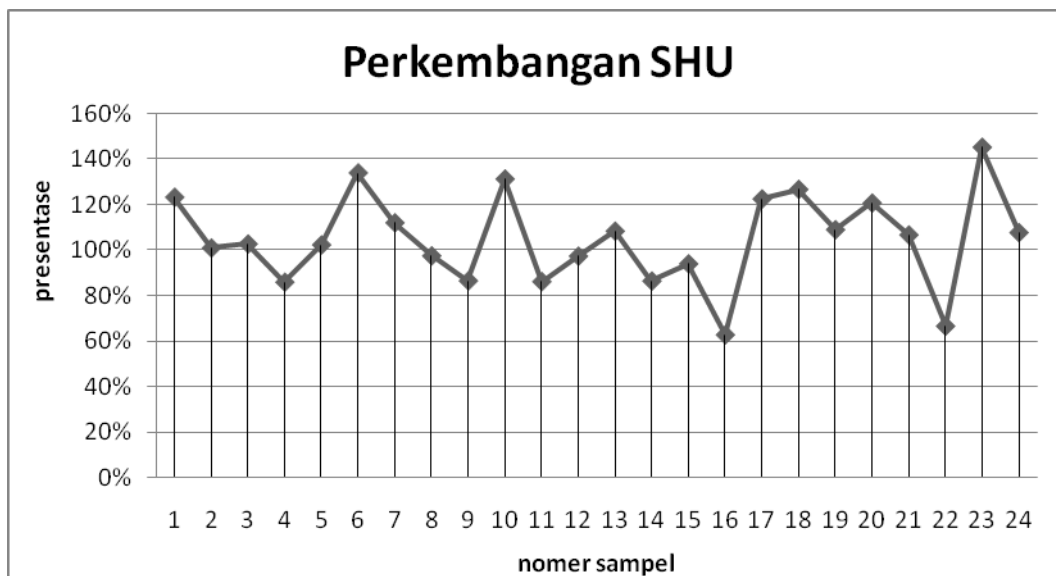
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan *Net Asset* KPRI di Kabupaten

Purbalingga

Berdasarkan gambar 4.3, dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan *net asset* KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 termasuk kategori rendah dengan rata-rata perkembangan hanya 109,39%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan KPRI yang dijadikan sebagai sampel, 15 KPRI (62,50%) mempunyai tingkat perkembangan *net asset* dengan kategori tinggi dan 9 KPRI (37,50%) dalam kategori rendah. Perkembangan *net asset* tertinggi mencapai 135,97% pada KPRI Kerta Praja dan perkembangan *net asset* terendah mencapai 83,27% pada KPRI Siap.

3) Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil Usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan dengan total biaya dalam satu periode akuntansi. Besarnya Sisa Hasil Usaha KPRI Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Grafik Perkembangan SHU KPRI di Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan SHU KPRI di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 termasuk kategori rendah dengan rata-rata perkembangan mencapai 104,85%. Dari keseluruhan KPRI yang dijadikan sebagai sampel, 8 KPRI (33,33%) mempunyai tingkat perkembangan net asset dengan kategori tinggi dan 16 KPRI (66,67%) dalam kategori rendah. Perkembangan SHU tertinggi mencapai 145,27% pada KPRI Warga Bina Satwa dan perkembangan SHU terendah mencapai 62,69% pada KPRI Sedar.

4.1.3. Analisis Regresi

Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan alat uji SPSS *windows release 17* dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai K-S Z signifikan maka data yang ada tidak

terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau yang mendekati normal.

Tabel 4.12 Hasil output Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.07849939
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.517
Asymp. Sig. (2-tailed)		.952

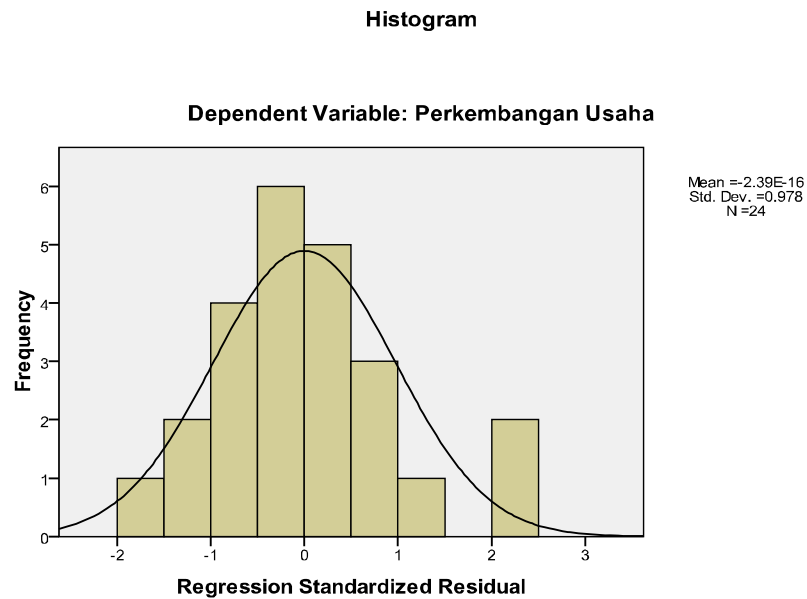
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

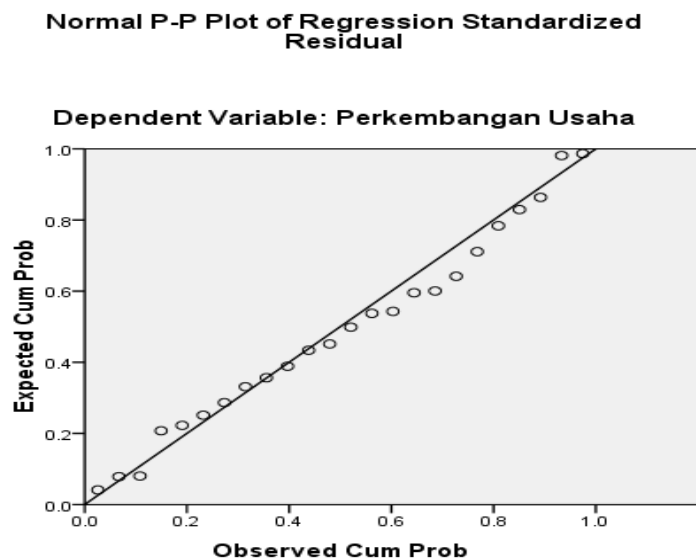
Berdasarkan tabel 4.12, hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk variabel penerapan PSAK No. 27 sebesar 0,517 dengan probabilitas signifikansi 0,952 dan nilainya jauh diatas 0,05, hal ini berarti variabel penerapan PSAK No. 27 berdistribusi normal.

Berikut ini adalah tampilan grafik histogram variabel penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27.

PERPUSTAKAAN
UNNES



Gambar 4.5 Histogram



Gambar 4.6 Normal P-P Plot of Regression Standardized

Dengan melihat tampilan grafik histogram pada gambar 4.5 maupun grafik normal plot pada gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pada gambar histogram, terbukti kurva membentuk lonceng. Selain itu diperkuat dengan gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized* dengan adanya data disepanjang dan searah pada garis diagonal.

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi terhadap perkembangan usaha KPRI. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan Program SPSS *windows release 17*. Jika koefisien b menunjukkan angka positif dan signifikan ($p\text{-value} \leq 0,05$) berarti penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha KPRI sehingga hipotesis dapat diterima, tetapi jika tidak maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.13 Hasil output SPSS regresi linier sederhana hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.779	19.619		1.212	.238
	Penerapan PSAK No. 27	1.296	.296	.683	4.382	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui variabel penerapan PSAK No. 27 memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,000 jauh dibawah 0,05 dan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 27 berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi. Koefisien b bernilai positif sebesar 1,296 menunjukkan adanya pengaruh positif antara penerapan PSAK No. 27 terhadap perkembangan usaha koperasi, atau dengan kata lain semakin tinggi penerapan PSAK No. 27 maka akan semakin meningkatkan perkembangan usaha koperasi. Persamaan bahwa perkembangan usaha koperasi dipengaruhi oleh penerapan PSAK No. 27 sebagai berikut:

$$Y = 23,779 + 1,296 X_1$$

Konstanta sebesar 23,779 menyatakan bahwa jika variabel penerapan PSAK No. 27 dianggap nol, maka rata-rata perkembangan usaha sebesar 23,779. Koefisien regresi penerapan PSAK No. 27 sebesar 1,296 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai penerapan PSAK No. 27 sebesar 1.000 skor maka akan meningkatkan perkembangan usaha sebesar 1.319,78 skor.

4.1.4. Uji Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien Penerapan PSAK terhadap Perkembangan Usaha dapat dilihat dari Koefisien Determinasi, seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.442	8.26006

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK No. 27

Tabel 4.14 menunjukkan nilai Adjusted R square sebesar 0,442 yang berarti kontribusi penerapan PSAK No. 27 terhadap perkembangan usaha sebesar 44,2%.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Penerapan PSAK No. 27 terhadap Perkembangan Usaha Koperasi

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan dan pengolahan data-data keuangan hingga menjadi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam mengambil keputusan ekonominya. Laporan keuangan yang dihasilkan dari

proses akuntansi berperan dalam penyediaan informasi keuangan organisasi, informasi tersebut dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja organisasi dan manajemen sekaligus digunakan untuk menilai perkembangan organisasi.

Kondisi yang semakin berkembang saat ini, membuat koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat (terutama anggotanya) dituntut untuk menerapkan *good governance*. Pertanggungjawaban koperasi sebagai komponen utama *good governance* harus dijadikan dasar bagi upaya penataan kelembagaan dan pengembangan usahanya. Sistem pertanggungjawaban yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat dalam menilai kinerja koperasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi anggota kepada koperasi. Peningkatan partisipasi anggota secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan koperasi.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan sebagai media informasi bagi para pemakai informasi keuangan baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan koperasi harus memperlihatkan kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh. Koperasi harus menyusun laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara transparan, lengkap, jelas, dan benar. Koperasi harus berpedoman pada standar khusus penyusunan laporan keuangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang akuntansi koperasi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dengan memperhatikan karakteristik koperasi sehingga dapat

menggambarkan kegiatan usaha koperasi dengan susunan harta, kewajiban serta modal secara rinci, jelas dan benar.

Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa KPRI di Kabupaten Purbalingga telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan dari 24 KPRI yang diteliti terdapat 21 KPRI (87,50%) telah menerapkan PSAK No. 27 dengan kategori baik dan 3 KPRI (12,50%) dengan kategori cukup baik. Rata-rata Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 pada KPRI di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 66,08%.

Upaya peningkatan akuntabilitas koperasi melalui penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 ditujukan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan koperasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan koperasi secara kuantitatif dapat dilihat dari seberapa perkembangan usahanya. Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 109,43%, apabila dibandingkan dengan standar perkembangan usaha koperasi yang ditetapkan oleh Dep. Kop. PK&M yaitu sebesar 110%, maka perkembangan usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga masih rendah. Perkembangan usaha koperasi itu sendiri diukur dari besarnya tingkat perkembangan volume usaha, *net asset* dan Sisa Hasil Usaha (Dep. Kop. PPK RI No. 20/PPK/1997).

Perkembangan volume usaha KPRI di Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat perkembangan usaha yang tinggi dengan rata-rata perkembangan

mencapai 114,06%. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari tingkat partisipasi anggota yang tinggi dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan koperasi. Perkembangan *net asset* KPRI di Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat perkembangan usaha yang rendah dengan rata-rata sebesar 109,39%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota terhadap permodalan koperasi masih rendah, sebab *net asset* menunjukkan tingkat partisipasi anggota terhadap modal koperasi yang dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengukur perkembangan usaha koperasi pada periode tertentu.

Indikator perkembangan usaha yang ketiga yaitu perkembangan SHU. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perkembangan SHU pada KPRI di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata perkembangan sebesar 104,85%. Kondisi ini berkebalikan dengan perkembangan volume usaha yang sudah termasuk kategori tinggi. Perhitungan Hasil Usaha dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya-biaya (Sitio dan Tamba, 2001:112), adanya tingkat perkembangan SHU yang rendah sedangkan tingkat perkembangan volume usaha yang tinggi menunjukkan bahwa KPRI di Kabupaten Purbalingga belum efisien dalam melakukan pengeluaran untuk biaya-biaya. Koperasi harus mampu mengendalikan biaya-biaya agar perkembangan SHU dapat tercapai.

Hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa variabel penerapan PSAK No. 27 berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi dan memiliki arah hubungan yang positif. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan penerapan PSAK No. 27 berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Penelitian ini menyatakan bahwa

semakin tinggi penerapan PSAK No. 27 maka perkembangan usaha koperasi menjadi semakin tinggi. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2007) dan Pitman dalam Tulus (2008), yang menyatakan bahwa mengikuti praktek-praktek akuntansi yang baik, dan mempersentasikan laporan-laporan keuangan secara regular sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu PSAK No. 27 berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Purbalingga termasuk kategori baik dengan presentase 66,08%.
2. Perkembangan Usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Purbalingga tahun 2008-2009 termasuk dalam kategori rendah dengan presentase perkembangan sebesar 109,43%.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui variabel penerapan PSAK No. 27 memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,000 jauh dibawah 0,05 dan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 27 berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagi KPRI di Kabupaten Purbalingga yang belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian dalam

penyusunan laporan keuangannya maupun yang masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, diharapkan dapat segera menerapkan, demi peningkatan kualitas pengelolaan dan perkembangan usaha koperasi.

2. Bagi para pengguna informasi laporan keuangan baik pihak intern maupun pihak ekstern, diharapkan dapat memberi masukan kepada koperasi untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: BP UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Himah, Faiqotul. 2009. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Klaten*. Skripsi. Surakarta: Ekonomi UMS.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Joesron, Tati Suhartati. 2005. *Manajemen Strategik Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Parmanto, Ridho. 2007. *Pengaruh Efisiensi Usaha, Efisiensi Anggota dan Partisipasi Ekonomi Anggota terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus*. Skripsi. Semarang: Ekonomi UNNES.
- Patriatiningrum, Rakhmawati. 2007. *Analisis Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha pada KUD di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005*. Skripsi. Semarang: Ekonomi UNNES.
- Ramadyanto, Widodo. 2004. *Praktek Akuntansi dan pelaporan keuangan koperasi: studi kasus pada koperasi karyawan kesehatan kabupaten jepara*. Kajian Ekonomi dan Keuangan.

- Riani, Eli Dwi. 2007. *Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep. Men. No. 129/KEP/M/KUKMM/XI/2002, Hambatan, permasalahan dan implementasinya (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia se-kabupaten Pemalang*. Skripsi. Semarang: Ekonomi UNNES.
- Sudarsono, Edilius. 2005. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: "Tarsito" Bandung.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia Ke Depan: Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?*. Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM University of Trisakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Victor. 2008. *Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi di NTT dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil*. Workshop regional II. Proceeding report. Kupang, NTT.
- Widiyanti, Ninik. 2007. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

LAMPIRAN



BLANGKO PENGAMATAN

Nama Koperasi :

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda *check list*(√) pada kolom jawaban yang sesuai!

1. Pertanyaan tentang Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Purbalingga

A. Konsep Penyusunan Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah dalam Koperasi anda laporan keuangan sudah menyajikan neraca?		
2	Apakah dalam Koperasi anda laporan keuangan sudah menyajikan perhitungan hasil usaha?		
3	Apakah dalam Koperasi anda laporan keuangan sudah menyajikan laporan arus kas?		
4	Apakah dalam Koperasi anda laporan keuangan sudah menyajikan Laporan Promosi Ekonomi anggota?		
5	Apakah dalam koperasi anda, neraca telah menyajikan informasi mengenai aset sesuai dengan PSAK koperasi?		
6	Apakah dalam koperasi anda, neraca telah menyajikan informasi mengenai kewajiban sesuai dengan PSAK koperasi?		
7	Apakah dalam koperasi anda, neraca telah menyajikan informasi mengenai ekuitas sesuai dengan PSAK koperasi?		
8	Apakah dalam koperasi anda, perhitungan hasil usaha telah memisahkan pos penghasilan yang berasal dari anggota dan non-anggota?		
9	Apakah dalam koperasi anda, perhitungan hasil usaha telah memuat laba atau rugi kotor dengan non-anggota?		
10	Apakah dalam koperasi anda, laporan arus kas sudah meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo akhir kas pada periode tertentu ?		
11	Dalam hal SHU tahun berjalan belum dibagi, apakah manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian SHU pada akhir tahun buku, Anda catat sebesar taksiran jumlah SHU yang akan dibagi untuk anggota?		
12	Apakah catatan atas laporan keuangan pada koperasi Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari aset?		
13	Apakah catatan atas laporan keuangan pada koperasi Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari kewajiban?		

14	Apakah catatan atas laporan keuangan pada koperasi Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari ekuitas?		
15	Apakah catatan atas laporan keuangan pada koperasi Anda, meliputi pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan dari pendapatan dan beban?		

B. Konsep Aset

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian pada Koperasi, apakah pada koperasi anda diakui sebagai aset lain-lain?		
2	Apakah aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya, anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?		
3	Apakah pada koperasi Anda, aset-aset yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aset?		
4	Apakah pada koperasi Anda, aset-aset yang dikelola oleh koperasi, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?		
5	Apakah pada koperasi anda,aset koperasi sudah dipisahkan antara aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain?		
6	Apakah dalam koperasi anda, sudah ada pemisahan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman pinjaman non-anggota?		

C. Konsep Kewajiban

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, Anda akui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo?		
2	Apakah pada koperasi anda, Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas, anda catat sebesar nilai nominalnya?		
3	Apakah dalam koperasi anda ada pemisahan hutang simpanan anggota dan non-anggota?		

D. Konsep Ekuitas

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah ekuitas koperasi anda terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi?		
2	Apakah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain dari anggota yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, Anda catat sebesar nilai nominalnya?		
3	Apakah simpanan pokok yang belum diterima dari anggota, Anda sajikan sebagai piutang simpanan pokok?		
4	Apakah simpanan wajib yang belum diterima dari anggota, Anda sajikan sebagai piutang simpanan wajib?		
5	Apakah kelebihan setoran simpanan pokok anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok anggota pendiri, Anda akui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota?		
6	Apakah kelebihan setoran simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan wajib anggota pendiri, Anda akui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota?		
7	Apakah modal penyertaan yang berupa uang atau barang yang ditanamkan oleh pemodal untuk meningkatkan usaha koperasi, Anda akui sebagai ekuitas?		
8	Apakah modal penyertaan, Anda catat sebesar jumlah nilai nominal setoran?		
9	Apakah modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, Anda catat sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima?		
10	Apakah ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal, Anda jelasan dalam catatan atas laporan keuangan?		
11	Apakah modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian, Anda akui sebagai ekuitas?		
12	Apakah modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjaman, Anda akui sebagai kewajiban jangka panjang?		
13	Apakah modal sumbangan yang tujuannya merupakan pinjaman, Anda jelasan dalam catatan atas laporan keuangan?		
14	Apakah Anda menyetor sebagian dari Sisa Hasil Usaha sebagai cadangan?		

15	Apakah cadangan dan tujuan penggunaannya, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?		
16	Apakah pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain, Anda bebankan pada cadangan?		
17	Apakah SHU tahun berjalan, Anda bagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi?		
18	Dalam hal jenis dan jumlah pembagian hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang menjadi hak koperasi, apakah Anda akui sebagai kewajiban?		
19	Apakah SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas, Anda catat sebagai SHU belum dibagi?		
20	Apakah SHU yang pembagiannya belum diatur secara jelas, Anda jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?		

E. Konsep Pendapatan Dan Beban

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto?		
2	Apakah pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, Anda akui sebagai pendapatan (penjualan) ?		
3	Apakah pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, Anda laporkan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha ?		
4	Dalam pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, Anda catat sebesar nilai transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha ?		
5	Apakah selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota, Anda akui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota?		
6	Apakah beban usaha dan beban perkoperasian, Anda sajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha ?		

2. Pertanyaan mengenai Perkembangan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Purbalingga (Rp.)

No	Indikator Perkembangan	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Total Volume usaha		
2	Total <i>net asset</i>		
3	Total SHU/laba bersih		



Tabulasi Hasil Pengamatan																	
Konsep Penyusunan Laporan Keuangan																	
No.	KPRI	KPL1	KPL2	KPL3	KPL4	KPL5	KPL6	KPL7	KPL8	KPL9	KPL10	KPL11	KPL12	KPL13	KPL14	KPL15	Tot. KPL
1	Sekar	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
2	Warga	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
3	Mempeng	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
4	Himpun	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9
5	Guyub	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
6	Bina Sejahtera	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
7	Mekar	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10
8	Mustaqiem	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10
9	Panca Marga	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
10	Dewi Sri	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
11	K3P	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
12	Mekarsari	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
13	Bhakti Praja	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
14	Siap	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10
15	Kesuma Dipenda	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9
16	Sedar	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10
17	Guyub Rukun	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
18	RAS	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
19	Kerta Praja	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
20	Rahayu	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
21	Eka	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
22	Al-Bar-kah	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10
23	Warga Bina Satwa	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
24	Mas	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12

Tabulasi Hasil Pengamatan

Konsep Konsep Aset

No.	KPRI	KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	total KA
1	Sekar	0	1	1	1	1	0	4
2	Warga	1	1	0	1	1	0	4
3	Mempeng	0	0	1	1	1	0	3
4	Himpun	0	0	1	1	1	0	3
5	Guyub	0	1	0	1	1	0	3
6	Bina Sejahtera	0	0	1	1	1	0	3
7	Mekar	1	1	1	1	1	0	5
8	Mustaqiem	1	0	1	1	1	0	4
9	Panca Marga	0	0	1	1	1	0	3
10	Dewi Sri	1	0	1	1	1	0	4
11	K3P	0	0	1	1	1	0	3
12	Mekarsari	0	1	1	0	1	0	3
13	Bhakti Praja	0	1	0	1	1	0	3
14	Siap	0	1	1	1	1	0	4
15	Kesuma Dipenda	0	0	1	1	1	0	3
16	Sedar	1	1	0	1	1	0	4
17	Guyub Rukun	0	0	1	1	1	0	3
18	RAS	1	1	1	1	1	0	5
19	Kerta Praja	1	0	1	1	1	0	4
20	Rahayu	1	0	1	1	1	0	4
21	Eka	1	0	1	1	1	0	4
22	Al-Barkah	1	0	1	1	1	0	4
23	Warga Bina Satwa	1	0	1	1	1	0	4
24	Mas	1	0	1	1	1	0	4

Tabulasi Hasil Pengamatan					
Konsep Kewajiban					
No.	KPRI	KK1	KK2	KK3	Total KK
1	Sekar	1	1	0	2
2	Warga	1	1	0	2
3	Mempeng	1	1	0	2
4	Himpun	0	1	0	1
5	Guyub	0	1	0	1
6	Bina Sejahtera	1	1	0	2
7	Mekar	1	1	0	2
8	Mustaqiem	1	1	0	2
9	Panca Marga	1	1	0	2
10	Dewi Sri	1	1	0	2
11	K3P	0	1	0	1
12	Mekarsari	0	1	0	1
13	Bhakti Praja	1	1	0	2
14	Siap	1	1	0	2
15	Kesuma Dipenda	0	1	0	1
16	Sedar	1	1	0	2
17	Guyub Rukun	1	1	0	2
18	RAS	1	1	0	2
19	Kerta Praja	1	1	0	2
20	Rahayu	1	1	0	2
21	Eka	1	1	0	2
22	Al-Barkah	1	1	0	2
23	Warga Bina Satwa	1	1	0	2
24	Mas	1	1	0	2

Tabulasi Hasil Pengamatan

Konsep Ekuitas

No.	KPRI	KE1	KE2	KE3	KE4	KE5	KE6	KE7	KE8	KE9	KE10	KE11	KE12	KE13	KE14	KE15	KE16	KE17	KE18	KE19	KE20	Total KE	
1	Sekar	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	13
2	Warga	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
3	Mempeng	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	14
4	Himpun	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	13
5	Guyub	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	13
6	Bina Sejahtera	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	14
7	Mekar	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
8	Mustaqiem	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
9	Panca Marga	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	13
10	Dewi Sri	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15
11	K3P	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	11
12	Mekarsari	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	13
13	Bhakti Praja	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	14
14	Siap	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	10
15	Kesuma Dipenda	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
16	Sedar	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
17	Guyub Rukun	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	14
18	RAS	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
19	Kerta Praja	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	13
20	Rahayu	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14
21	Eka	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	15
22	Al-Barkah	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
23	Warga Bina Satwa	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
24	Mas	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	13

Tabulasi Hasil Pengamatan
Konsep Pendapatan dan Beban

No.	KPRI	KPB1	KPB2	KPB3	KPB4	KPB5	KPB6	Total KPB
1	Sekar	1	1	0	1	0	1	4
2	Warga	1	1	0	1	0	0	3
3	Mempeng	1	1	0	1	0	0	3
4	Himpun	1	1	0	1	0	0	3
5	Guyub	1	1	0	1	0	0	3
6	Bina Sejahtera	1	1	0	1	0	0	3
7	Mekar	1	1	0	1	0	1	4
8	Mustaqiem	1	1	0	1	0	0	3
9	Panca Marga	1	1	0	1	0	0	3
10	Dewi Sri	1	1	0	1	0	1	4
11	K3P	1	1	0	1	0	0	3
12	Mekarsari	1	1	0	1	0	0	3
13	Bhakti Praja	1	1	0	1	0	0	3
14	Siap	1	1	0	1	0	0	3
15	Kesuma Dipenda	1	1	0	1	0	1	4
16	Sedar	1	1	0	1	0	0	3
17	Guyub Rukun	1	1	0	1	0	0	3
18	RAS	1	1	0	1	0	1	4
19	Kerta Praja	1	1	0	1	0	1	4
20	Rahayu	1	1	0	1	0	1	4
21	Eka	1	1	0	1	0	1	4
22	Al-Barkah	1	0	0	1	0	1	3
23	Warga Bina Satwa	1	1	0	1	0	1	4
24	Mas	1	1	0	1	0	0	3

Tabulasi Volume Usaha				
No.	KPRI	total volume usaha		perkembangan volume usaha
		2008	2009	
1	Sekar	Rp 2.174.691.000,00	Rp 2.592.980.000,00	119,23%
2	Warga	Rp 469.837.825,00	Rp 575.178.054,00	122,42%
3	Mempeng	Rp 1.651.566.650,00	Rp 1.960.535.550,00	118,71%
4	Himpun	Rp 317.992.509,00	Rp 339.807.000,00	106,86%
5	Guyub	Rp 469.132.953,00	Rp 588.958.976,00	125,54%
6	Bina Sejahtera	Rp 877.336.840,00	Rp 1.084.160.075,00	123,57%
7	Mekar	Rp 4.944.455.335,83	Rp 5.556.182.345,00	112,37%
8	Mustaqiem	Rp 467.915.500,00	Rp 444.501.654,00	95,00%
9	Panca Marga	Rp 513.631.882,00	Rp 517.540.000,00	100,76%
10	Dewi Sri	Rp 786.686.000,00	Rp 959.204.000,00	121,93%
11	K3P	Rp 165.477.801,00	Rp 197.706.419,00	119,48%
12	Mekarsari	Rp 338.100.000,00	Rp 302.056.000,00	89,34%
13	Bhakti Praja	Rp 322.954.568,00	Rp 345.187.300,00	106,88%
14	Siap	Rp 117.463.420,00	Rp 149.311.000,00	127,11%
15	Kesuma Dipenda	Rp 383.350.000,00	Rp 551.160.000,00	143,77%
16	Sedar	Rp 827.941.814,36	Rp 740.711.561,00	89,46%
17	Guyub Rukun	Rp 1.556.151.821,00	Rp 2.343.129.625,00	150,57%
18	RAS	Rp 1.487.813.454,20	Rp 1.852.768.692,00	124,53%
19	Kerta Praja	Rp 359.300.000,00	Rp 228.200.000,00	63,51%
20	Rahayu	Rp 1.212.930.000,00	Rp 1.357.246.000,00	111,90%
21	Èka	Rp 1.125.799.917,00	Rp 1.327.084.844,00	117,88%
22	Al-Barkah	Rp 130.300.000,00	Rp 161.841.860,00	124,21%
23	Warga Bina Satwa	Rp 107.943.150,00	Rp 125.865.150,00	116,60%
24	Mas	Rp 4.755.354.589,82	Rp 5.027.737.606,57	105,73%

Tabulasi net asset				
No.	KPRI	total net asset		perkembangan net asset
		2008	2009	
1	Sekar	Rp 1.585.570.650,00	Rp 1.744.325.325,00	110,01%
2	Warga	Rp 386.150.837,00	Rp 452.413.654,00	117,16%
3	Mempeng	Rp 1.369.355.140,62	Rp 1.524.413.767,32	111,32%
4	Himpun	Rp 244.322.609,00	Rp 269.830.199,00	110,44%
5	Guyub	Rp 1.025.763.150,00	Rp 971.158.201,00	94,68%
6	Bina Sejahtera	Rp 723.152.834,00	Rp 706.103.208,00	97,64%
7	Mekar	Rp 2.380.888.712,73	Rp 3.026.429.141,51	127,11%
8	Mustaqiem	Rp 248.739.285,00	Rp 212.581.965,00	85,46%
9	Panca Marga	Rp 479.947.051,00	Rp 468.877.550,00	97,69%
10	Dewi Sri	Rp 630.152.482,00	Rp 704.776.482,00	111,84%
11	K3P	Rp 121.255.144,00	Rp 115.080.833,00	94,91%
12	Mekarsari	Rp 241.844.590,00	Rp 289.105.104,00	119,54%
13	Bhakti Praja	Rp 1.169.706.843,13	Rp 1.303.263.295,12	111,42%
14	Siap	Rp 187.355.892,00	Rp 156.009.970,00	83,27%
15	Kesuma Dipenda	Rp 555.590.003,00	Rp 633.496.348,00	114,02%
16	Sedar	Rp 813.893.792,92	Rp 894.793.941,14	109,94%
17	Guyub Rukun	Rp 1.179.187.723,47	Rp 1.346.647.275,47	114,20%
18	RAS	Rp 940.142.378,78	Rp 1.143.176.416,63	121,60%
19	Kerta Praja	Rp 161.346.759,00	Rp 219.385.229,00	135,97%
20	Rahayu	Rp 719.949.715,47	Rp 803.933.202,47	111,67%
21	Eka	Rp 2.035.388.113,00	Rp 2.324.536.890,00	114,21%
22	Al-Barkah	Rp 169.752.287,00	Rp 184.711.286,00	108,81%
23	Warga Bina Satwa	Rp 106.067.306,03	Rp 134.050.861,03	116,60%
24	Mas	Rp 3.733.725.502,87	Rp 4.121.796.120,30	105,73%

Tabulasi SHU				
No.	KPRI	Total SHU		perkembangan SHU
		2008	2009	
1	Sekar	Rp 52.063.136,00	Rp 64.184.549,00	123,28%
2	Warga	Rp 29.658.048,00	Rp 29.929.725,00	100,92%
3	Mempeng	Rp 31.756.908,00	Rp 32.617.268,00	102,71%
4	Himpun	Rp 24.764.603,00	Rp 21.270.778,00	85,89%
5	Guyub	Rp (77.176.746,00)	Rp 1.793.374,00	102,32%
6	Bina Sejahtera	Rp 14.065.167,00	Rp 18.844.639,00	133,98%
7	Mekar	Rp 67.964.663,33	Rp 76.153.283,34	112,05%
8	Mustaqiem	Rp 4.144.600,00	Rp 4.040.000,00	97,48%
9	Panca Marga	Rp 13.300.000,00	Rp 11.500.000,00	86,47%
10	Dewi Sri	Rp 20.022.800,00	Rp 26.289.475,00	131,30%
11	K3P	Rp 7.978.993,00	Rp 6.872.277,00	86,13%
12	Mekarsari	Rp 4.177.938,00	Rp 4.067.073,00	97,35%
13	Bhakti Praja	Rp 27.315.386,00	Rp 29.591.760,00	108,33%
14	Siap	Rp 4.647.108,00	Rp 4.015.425,00	86,41%
15	Kesuma Dipenda	Rp 21.870.450,00	Rp 20.551.300,00	93,97%
16	Sedar	Rp 17.310.154,80	Rp 10.852.034,00	62,69%
17	Guyub Rukun	Rp 54.473.625,00	Rp 66.753.333,00	122,54%
18	RAS	Rp 78.033.799,07	Rp 98.912.848,31	126,76%
19	Kerta Praja	Rp 11.048.300,00	Rp 12.043.100,00	109,00%
20	Rahayu	Rp 90.840.137,00	Rp 109.672.992,00	120,73%
21	Eka	Rp 57.342.815,00	Rp 61.169.560,00	106,67%
22	Al-Barkah	Rp 5.023.327,00	Rp 3.342.130,00	66,53%
23	Warga Bina Satwa	Rp 2.165.400,00	Rp 3.145.600,00	145,27%
24	Mas	Rp 82.387.829,13	Rp 88.724.460,49	107,69%

Tabel Persiapan Kerja Varibel Penelitian

No.	KPRI	Penerapan PSAK No. 27	Perkembangan Usaha	RES_1
1	Sekar	70,00	117,51	2,99919
2	Warga	72,00	113,5	-3,60314
3	Mempeng	68,00	110,91	-1,00848
4	Himpun	58,00	101,06	2,10316
5	Guyub	64,00	107,51	0,77617
6	Bina Sejahtera	68,00	118,4	6,48152
7	Mekar	66,00	117,18	7,85385
8	Mus taqiem	58,00	92,65	-6,30684
9	Panca Marga	66,00	94,97	-14,35615
10	Dewi Sri	74,00	121,69	1,99454
11	K3P	60,00	100,17	-1,37917
12	Mekarsari	64,00	102,08	-4,65383
13	Bhakti Praja	68,00	108,88	-3,03848
14	Siap	58,00	98,93	-0,02684
15	Kesuma Dipenda	58,00	117,26	18,30316
16	Sedar	58,00	87,37	-11,58684
17	Guyub Rukun	68,00	129,11	17,19152
18	RAS	74,00	124,29	4,59454
19	Kerta Praja	70,00	102,83	-11,68081
20	Rahayu	72,00	114,77	-2,33314
21	Eka	74,00	112,96	-6,73546
22	Al-Barkah	58,00	99,85	0,89316
23	Warga Bina Satwa	72,00	126,16	9,05686
24	Mas	68,00	106,38	-5,53848

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Penerapan PSAK No. 27	24	16.00	58.00	74.00	1586.00	66.0833	5.82287	33.906
Perkembangan Usaha	24	41.74	87.37	129.11	2626.42	109.4342	11.05555	122.225
Valid N (listwise)	24							

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

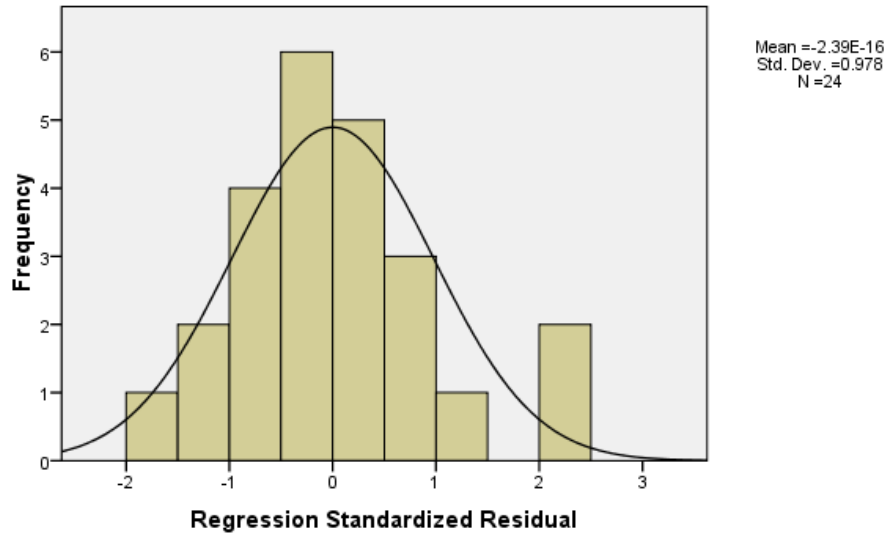
		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.07849939
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.517
Asymp. Sig. (2-tailed)		.952

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

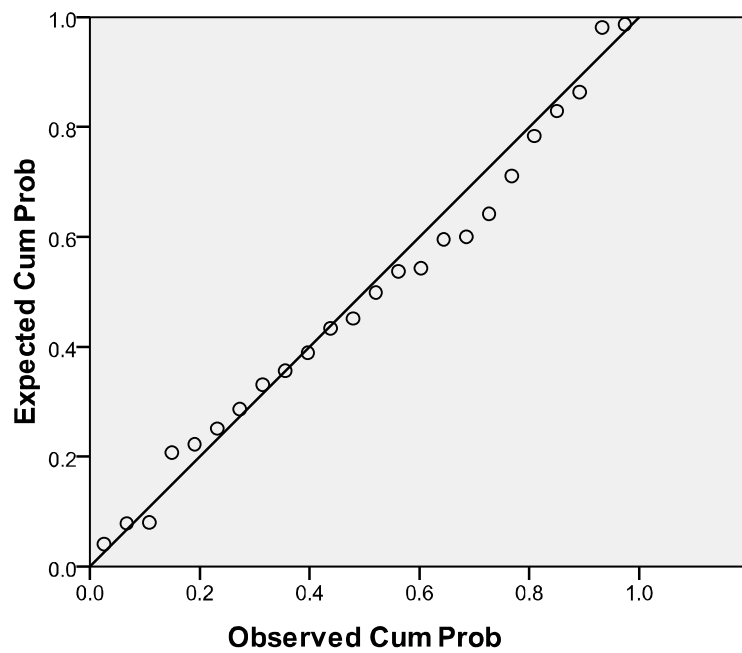
Histogram

Dependent Variable: Perkembangan Usaha



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Perkembangan Usaha



Uji Regresi

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan PSAK No. 27 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Perkembangan Usaha

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.442	8.26006

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK No. 27

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1310.151	1	1310.151	19.202	.000 ^a
	Residual	1501.030	22	68.229		
	Total	2811.181	23			

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK No. 27

b. Dependent Variable: Perkembangan Usaha

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.779	19.619		1.212	.238
	Penerapan PSAK No. 27	1.296	.296	.683	4.382	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha